



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II**

**“OPTIMALISASI PROGRAM PENEGAKAN PERDA TENTANG
REKLAME MELALUI PENYULUHAN DIGITAL DAN
PENINGKATAN PAJAK REKLAME UNTUK DAERAH (PRADA) DI
KABUPATEN KERINCI”**

Disusun oleh :

Nama : PANDER
NIP : 199412202025051001
Jabatan : CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Instansi : SATPOLPP dan DAMKAR Kabupaten
Kerinci
Kelas/Kelompok : 3
No. Absen : 25
Angkatan : 7

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONAL BUKIT TINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Judul : Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci.

Nama : PANDER

NIP : 199412202025051001

Pangkat/golongan : II/a

Jabatan : CPNS Polisi Pamong Praja Terampi

Instansi : SATPOLPP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci

Angkatan/Kelompok : 7/3

No. Absen : 25

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 17 Oktober 2025

Coach,

Penguji,

(**RETWANDO,S.Kom., M.Si**)
NIP. 198803282011011004

(**SARJAYADI, S.S., M.A.P**)
NIP. 197003041996031001

Mengetahui,
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Regional Bukittinggi

(**SARJAYADI, S.S., M.A.P**)
NIP. 197003041996031001

**BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI**

Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 17 Oktober 2025
Pukul : 08:00 s/d 16:00 WIB
Tempat : Kampus PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Telah Diseminarkan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan VII Tahun 2025.

Judul : Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci.
Nama : PANDER
NIP : 199412202025051001
Pangkat/golongan : II/a
Jabatan : CPNS Polisi Pamong Praja Terampil
Instansi : SATPOLPP dan DAMKAR Kabupaten Kerinci
Angkatan/Kelompok : 7/3
No. Absen : 25

Dan telah mendapat pengujian/komentar/masukan/saran dari Penguji, Mentor, dan Coach/Moderator.

COACH,

PESERTA,

**(RETWANDO,S.Kom.,M.Si)
NIP. 198803282011011004**

**(PANDER)
NIP. 199412202025051001**

PENGUJI,

MENTOR,

**(SARJAYADI, S.S., M.A.P)
NIP. 197003041996031001**

**(KUSAINI,S.Sos)
NIP. 198203102008011002**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamiin Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Latsar CPNS ini dengan judul “ Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci ”.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menggambarkan langkah-langkah aktualisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta kedudukan dan peran ASN dalam menjalankan tugas sehari-hari dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, khususnya di satpolpp Kabupaten Kerinci. Isu yang diangkat merupakan kondisi nyata di lapangan yang membutuhkan solusi kreatif dan implementatif agar dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bimbingan, arahan serta dukungan yang telah diberikan selama ini kepada :

1. Bapak H. Sarjayadi, S.S., M.A.P selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi;
2. Bapak Retwando, S.Kom., M.Si selaku coach penulis yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama proses aktualisasi;
3. Bapak Kusaini, S.Sos selaku Kepala Seksi Trantibum sekaligus Mentor penulis yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberi bimbingan dan arahan selama proses aktualisasi;
4. Seluruh Widyaismara, pelatih, dan pembina PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi pada Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII Gelombang I tahun 2025;

5. Seluruh rekan-rekan Peserta Pelatihan Dasar CPNS Angkatan VII Gelombang I Tahun 2025 di PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi yang senantiasa memberikan dukungan, kerjasama, dan semangat dalam penyelesaian laporan aktualisasi;
6. Semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Laporan Aktualisasi ini masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki, baik dari segi penulisan maupun isi Laporan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan dalam laporan aktualisasi ini. Semoga laporan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua terutama bagi instansi penulis dalam pelaksanaan pelayanan publik yang BerAKHLAK.

Kerinci, 17 Oktober 2025
Peserta,

PANDER

NIP. 199412202025051001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	i
BERITA ACARA SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	6
A. Profil Instansi	6
B. Profil Peserta dan Profil Role Model	8
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI	11
A. Deskripsi Core Isu	11
B. Penetapan Core Isu	15
C. Analisis Core Isu	17
D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu	19
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	20
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	20
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	21
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (Ber-AKHLAK)	27
D. Capaian Penyelesaian Core Isu	28
E. Manfaat Terselenggaranya Core Isu	29
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	30
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	31
A. Kesimpulan	31
B. Rekomendasi	32
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

3.1 Identifikasi Isu di Satpolpp dan Damkar Kabupaten Kerinci.....	11
3.2 Jumlah reklame yang melanggar perda.....	12
3.3 Data sekolah tingkat SMA/SMK yang belum dilakukan patroli rutin.....	13
3.4 Data 30 PKL yang masih berjualan di bahu jalan Nasional.....	14
3.5 Penentuan core isu dengan metode APKL	15
4.1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi.....	20
4.2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi.....	21
4.3 Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK).....	27
4.4 Kondisi core isu.....	28
4.5 Tindak lanjut hasil aktualisasi.....	30

DAFTAR GAMBAR

2.1 Profil Satpolpp Kabupaten Kerinci	6
2.2 Profil Peserta Latsar.....	8
2.3 Profil Role Model.....	9
3.1 Diagram Fish Bone	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan Satpol PP menjadi penting karena memiliki tugas utama membantu kepala daerah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Trantibum), serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (Linmas). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1), yang menyatakan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Kedudukan dan fungsi Satpol PP diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menguraikan secara rinci tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP dalam mendukung terwujudnya ketertiban umum, kepastian hukum, serta pelayanan publik.

Salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di Kabupaten Kerinci adalah penegakan Perda reklame. Reklame pada hakikatnya merupakan sarana komunikasi massa yang berfungsi menyampaikan informasi dan promosi kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, reklame juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme Perda nomor 1 tahun 2024

tentang pajak daerah dan restriksi daerah. Namun demikian, penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan ketentuan justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Reklame yang dipasang tanpa izin, melanggar tata ruang kota, atau dipasang secara sembarangan dapat mengurangi estetika lingkungan, menimbulkan potensi kecelakaan lalu lintas, serta menimbulkan kerugian finansial bagi daerah akibat hilangnya potensi pajak daerah seperti yang telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten kerinci nomor 1 tahun 2024.

Di Kabupaten Kerinci, masih dijumpai pelanggaran reklame, baik berupa pemasangan tanpa izin maupun tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang ketentuan hukum terkait reklame. Kedua, terbatasnya sarana dan media penyuluhan yang digunakan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, sehingga sosialisasi Perda reklame belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, masih adanya persepsi bahwa penegakan Perda reklame hanya sebatas tindakan penertiban fisik, padahal yang lebih penting adalah meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat melalui upaya edukasi yang berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini membuka peluang baru bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan dan penyuluhan kepada masyarakat. Media sosial resmi instansi dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi publik yang efektif. Melalui platform digital ini, pesan-pesan penyuluhan mengenai ketentuan Perda tentang reklame dapat disampaikan secara cepat, luas, interaktif, dan tepat sasaran. Dengan demikian, pemanfaatan

media sosial dan website dapat menjadi strategi alternatif sekaligus pelengkap terhadap metode penyuluhan konvensional yang selama ini dilakukan secara tatap muka.

Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci memiliki nilai strategis dan mampu memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke masyarakat yang sulit dijangkau. Selain itu, langkah optimalisasi ini juga mendukung implementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya pada aspek orientasi pelayanan (memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah diakses), akuntabel (penyuluhan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan), kompeten (ASN menguasai teknologi informasi dalam menunjang tugasnya), serta kolaboratif (menggandeng berbagai pihak termasuk masyarakat dan pelaku usaha untuk mewujudkan ketertiban reklame).

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusunan Laporan Pelaksanaan Aktualisasi dengan judul “ **Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci** ” menjadi penting untuk dilaksanakan. Rancangan ini diharapkan mampu memberikan solusi inovatif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meminimalisasi pelanggaran reklame, memperkuat citra Satpol PP sebagai pelayan masyarakat, dan peningkatan PAD di Kabupaten Kerinci.

B. Tujuan

Tujuan Judul (Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan Perda reklame.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan website Satpol PP sebagai sarana komunikasi publik.
3. Mendukung upaya peningkatan ketertiban umum, keindahan kota, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kepatuhan masyarakat terhadap Perda reklame.

Tujuan kegiatan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas melalui kegiatan penyuluhan Perda reklame.
2. Mengembangkan kompetensi ASN agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik.
3. Memberikan kontribusi nyata bagi instansi Satpol PP Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda.

C. Ruang Lingkup

Aktualisasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yaitu selama agenda 4 dan ditambah jadwal off campus Latsar CPNS. Kegiatan akan berlangsung selama masa aktualisasi, dengan pembagian tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan penyuluhan, hingga evaluasi hasil kegiatan.

Lokasi kegiatan terfokus di Kantor Satpolpp Kabupaten Kerinci sebagai pusat koordinasi penyuluhan. Selain itu, penyebaran informasi dilakukan secara online yang berfungsi sebagai media penyuluhan digital kepada masyarakat.

Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi peserta Latsar CPNS sebagai pelaksana kegiatan, serta pihak-pihak internal instansi yang berperan dalam penyusunan dan pengelolaan media digital. Selain itu, penyelenggara reklame menjadi sasaran utama dalam penerimaan materi penyuluhan.

Cara pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, dilakukan identifikasi dan pengumpulan bahan materi terkait Perda reklame yang berlaku. Kedua, materi tersebut disusun dalam bentuk konten digital yang menarik dan mudah dipahami. Ketiga, konten dipublikasikan melalui media sosial dan website resmi Satpol PP Kabupaten Kerinci. Selanjutnya, dilakukan monitoring terhadap interaksi dan respon masyarakat, serta evaluasi hasil penyuluhan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat terhadap pentingnya kepatuhan pada Perda reklame.

BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi



2.1 Gambar Profil Instansi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci adalah perangkat pemerintah daerah yang bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci memiliki fungsi menyusun program dan melaksanakan penegakan peraturan daerah, kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci memiliki visi dan misi yang sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Kerinci, yaitu "Mewujudkan Kerinci yang Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera". Misi yang mendukung visi tersebut adalah:

1. Menciptakan birokrasi pemerintah yang berkualitas dan pelayanan publik adaptif serta supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan.
2. Meningkatkan pengembangan ekonomi inklusif berbasis pertanian.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender untuk SDM berdaya saing serta ketahanan sosial budaya.
4. Meningkatkan infrastruktur kewilayahan dan ketahanan bencana serta ekologi.
5. Pengembangan inovasi untuk kemandirian dan daya saing daerah serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Visi dan misi ini menjadi arah sekaligus pedoman kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci dalam bertugas menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, serta sub urusan kebakaran.

Nilai-nilai organisasi Satpolpp dan Damkar Kabupaten Kerinci :

1. Penegakan Perda, Pelayanan Ketertiban & Ketentraman
Menegakkan Perda, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Pendekatan Humanis
Menyampaikan imbauan secara ramah dan sopan
3. Koordinasi yang Efektif
Melakukan Kinerja yang baik dan koordinasi antar individu, lembaga dan instansi terkait

4. Profesionalitas & Akuntabilitas

Bekerja dengan profesional, bertindak sesuai aturan, dan bertanggung jawab atas tugasnya .

5. Responsivitas terhadap Masyarakat

Kepekaan terhadap aspirasi dan kondisi demi pelayanan yang efektif .

B. Profil Peserta

1. Profil peserta



2.2 Gambar Profil Peserta

Nama saya adalah Pander, lahir di kabupaten kerinci 20 desember 1994, umur saat ini 30 tahun, saya bersekolah di SMA Negeri 12 Kerinci, tamatan tahun 2012. saya merupakan CPNS Satpolpp Kabupaten Kerinci bertugas sebagai polisi pamong praja terampil dan peserta Latsar 2025 di PPSDM Bukittinggi, dan memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam pelatihan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukittinggi, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, saya tergabung pada Gelombang 1, Angkatan 7, Kelompok 3. Melalui pelaksanaan Latsar ini, saya berharap dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sebagai ASN, mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN secara konsisten, serta berperan aktif dalam mendukung tercapainya tujuan instansi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mendukung visi dan misi pemerintah kabupaten kerinci.

2. Profil Role Model



2.3 Gambar Role Model

Dalam melaksanakan tugas sebagai Polisi Pamong Praja Terampil di Satpolpp dan Damkar Kabupaten Kerinci, saya memiliki seorang atasan langsung yang menjadi role model dalam bersikap dan berperilaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yaitu Bapak AGUS RIAN TO, SE. Dengan Nomor Induk Pegawai 197406132010011003.

Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Satpolpp Kabupaten Kerinci. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat struktural, beliau menjalankan pelaksanaan kegiatan bidang dengan baik. Keteladanan beliau tercermin dari kemampuannya dalam memimpin dengan sikap ramah, namun tetap tegas serta tanggap dalam mengambil keputusan, disertai keterbukaan untuk mendengarkan pendapat bawahan, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan bidang berjalan selaras dengan arah kebijakan lingkungan daerah dan nasional. Salah satu nilai ASN yang sangat menonjol dari beliau adalah Akuntabel, yang terlihat dari komitmen beliau dalam menjaga kedisiplinan.

Selain itu, nilai kolaboratif dan harmonis menjadi ciri khas dari beliau. Tidak hanya membangun koordinasi antar anggota satpolpp tetapi juga aktif membangun koordinasi lintas bidang dan lintas instansi. Beliau mampu menjembatani komunikasi antara pimpinan, staf fungsional, dan mitra kerja eksternal. Keteladanan yang ditunjukkan oleh beliau menjadi sumber inspirasi bagi saya dalam menginternalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK.

BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Isu

hasil pemetaan isu di lingkungan kerja Satpolpp Kabupaten Kerinci. Informasi ini disusun dalam bentuk tabel untuk menunjukkan perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam merancang rencana aktualisasi.

Tabel 3.1 Identifikasi Isu di Satpolpp dan Damkar Kabupaten Kerinci

No	Isu	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
1	Belum optimalnya sistem penegakan Perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD.	Rendahnya kesadaran penyelenggara reklame dalam pembayaran pajak yang menyebabkan rendahnya PAD seperti di kecamatan siulak, siulak mukai dan gunung kerinci terdapat beberapa reklame yang melanggar perda atau tidak taat pajak	Kepatuhan penyelenggara reklame dalam pembayaran pajak di beberapa wilayah di kabupaten kerinci
2	Belum adanya kegiatan patroli rutin terhadap siswa bolos	Tidak adanya patroli rutin di 4 sekolah tingkat SMA/SMK di kabupaten kerinci menyebabkan kenakalan remaja meningkat dari tahun ke tahun terutama ketidakhadiran siswa ke sekolah (bolos).	Meningkatnya disiplin kehadiran terhadap siswa di 4 sekolah tingkat SMA/SMK di kabupaten kerinci. Dan menurunnya tingkat kenakalan remaja.
3	Belum adanya kegiatan penertiban terhadap PKL yang mengganggu jalan nasional	Menyempitnya ruang jalan bagi pengendara dan wajah kota yang tidak rapi dan tertata terutama di siulak (ibukota kabupaten) terdapat ± 30 PKL yang berjualan di trotoar	Kenyamanan bagi pengendara dan serta wajah kota yang lebih rapi dan tertata dan penertiban 30 PKL ke tempat yang telah ditentukan

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, ditemukan tiga isu utama yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut secara terstruktur.

Pertama, **belum optimalnya sistem penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD.**

Selama ini, penyelenggaraan reklame beberapa wilayah Kabupaten Kerinci masih menghadapi sejumlah kendala seperti temuan dilapangan masih terdapat ± 10 reklame yang tidak taat dalam pembayaran pajak, serta pemasangannya tidak sesuai ketentuan. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan data temuan dilapangan dan dihimpun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 tabel jumlah reklame yang melanggar perda

No.	Lokasi Reklame	Jumlah Reklame
1	Kecamatan Siulak	4 unit
2	Kecamatan Siulak Mukai	3 unit
3	Kecamatan Gunung Kerinci	3 unit
Total		10 unit

Sumber : Data hasil survei penulis, 2025

Kondisi yang diharapkan dari penegakan peraturan ini adalah seluruh reklame yang terpasang harus sesuai dengan ketentuan perda, baik dari sisi administrasi pembayaran pajak maupun teknis pemasangan. Dengan demikian, tidak ada lagi reklame ilegal yang merugikan daerah, dan potensi PAD dapat digali secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Kedua, Belum Adanya Kegiatan Patroli Rutin terhadap Siswa yang Bolos di Sekolah

Sampai saat ini, belum adanya pelaksanaan patroli rutin di 4 sekolah tingkat SMA/SMK yang ada di beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci. Akibatnya, perilaku menyimpang seperti membolos ke sekolah masih sering terjadi dan berimplikasi pada meningkatnya kenakalan remaja. Kondisi ini menandakan lemahnya pengawasan serta belum adanya sinergi antara aparat penegak perda, sekolah, dan orang tua.

Berdasarkan data sekolah tingkat SMA/SMK yang belum dilakukan patroli rutin dihimpun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3 data sekolah tingkat SMA/SMK yang belum dilakukan patroli rutin

NO.	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH	PERSENTASE SISWA BOLOS
1	Smk Negeri 1 Kerinci	Kecamatan Kayu Aro Barat	10 %
2	Smk Negeri 7 Kerinci	Kecamatan Siulak Mukai	15 %
3	Sma Negeri 12 Kerinci	Kecamatan Gunung Kerinci	20 %
4	Sma Negeri 4 Kerinci	Kecamatan Siulak	20 %

Sumber : Data hasil survei penulis, 2025

Kondisi ideal yang diharapkan adalah terlaksananya patroli rutin di sekolah-sekolah tersebut guna menekan angka siswa yang membolos dan meminimalisir kenakalan remaja. Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan kedisiplinan siswa sehingga dapat lebih fokus dalam belajar dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kerinci dapat terus meningkat.

Ketiga, belum adanya kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang mengganggu jalan nasional.

Fenomena maraknya PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan nasional menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari menyempitnya ruang lalu lintas bagi pengguna jalan, terganggunya ketertiban umum, hingga meningkatnya potensi kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan terdapat 30 PKL yang masih berjualan dibahu jalan nasional. dihimpun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4 data 30 PKL yang masih berjualan di bahu jalan Nasional

NO.	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PKL
1	Tutung Bungkok	Siulak	10
2	Koto Rendah	Siulak	5
3	Pasar Senin	Siulak	5
4	Siulak Panjang	Siulak	5
5	Koto Beringin	Siulak	5
TOTAL			30

Sumber : Data hasil survei penulis, 2025

Kondisi ideal yang diharapkan adalah tidak adanya lagi PKL yang berjualan di bahu jalan nasional. ruang lalu lintas yang layak dan tertata rapi bagi pengguna jalan, kenyamanan bagi masyarakat, hingga hilangnya potensi kecelakaan lalu lintas.

B. Penetapan Core Isu

Dalam rangka menetapkan isu yang paling mendesak serta strategis untuk dijadikan dasar penyusunan aktualisasi Latsar CPNS tahun 2025 ini, digunakan metode APKL yaitu Aktual (A) Menggambarkan sejauh mana isu tersebut benar-benar terjadi saat ini di lapangan. Problematik (P) Menunjukkan tingkat kesulitan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh isu. Kekhalayakan (K) Menilai sejauh mana isu berdampak luas bagi masyarakat atau khalayak umum. Layak (L) Mengukur kelayakan isu untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusi dalam konteks aktualisasi. Setiap isu dinilai dengan mengacu pada keempat kriteria tersebut, kemudian diberikan skor kualitatif pada rentang 1–5 untuk masing-masing aspek. Hasil penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan isu prioritas yang memperoleh skor tertinggi.

Berikut disajikan Tabel hasil analisis terhadap tiga isu utama yang telah diidentifikasi.

Tabel 3.5 Penentuan *core issue* dengan metode APKL

No	Isu	A	P	K	L	Jumlah	Peringkat
1	Belum optimalnya sistem penegakan Perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD	5	4	4	3	16	I
2	Belum adanya kegiatan patroli rutin terhadap siswa bolos	4	3	3	3	13	II
3	Belum adanya kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu jalan nasional	3	3	3	3	12	III

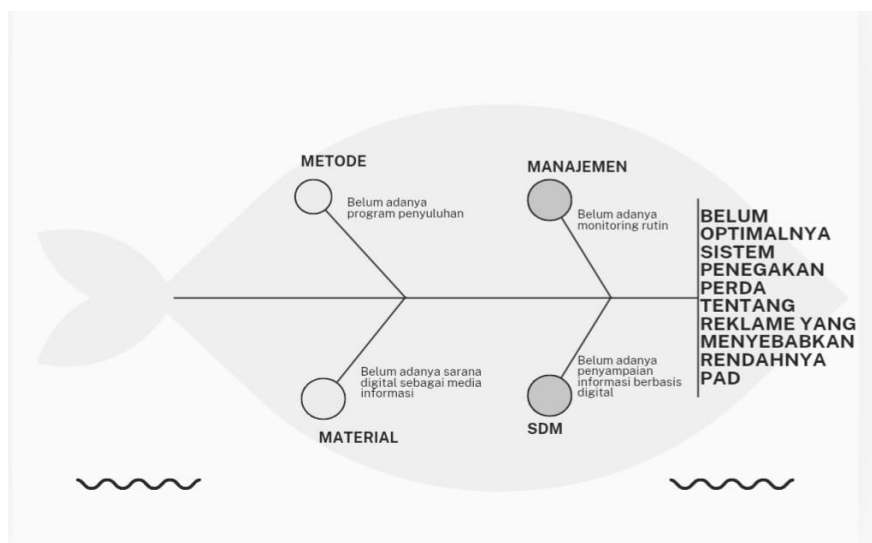
Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode APKL (Aktual, Problematis, Kekhalayakan, dan Layak), telah dilakukan penentuan prioritas isu yang dihadapi Satpol PP. Dari tiga isu yang teridentifikasi, isu “Belum optimalnya sistem penegakan Perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD” menempati peringkat pertama sebagai core issue. Hal ini dibuktikan dengan skor tertinggi yaitu 16 poin, yang menunjukkan bahwa isu ini paling aktual, paling problematis, berdampak luas terhadap masyarakat (kekhalayakan), serta layak untuk segera ditangani.

Sementara itu, isu “Belum adanya kegiatan patroli rutin terhadap siswa bolos” memperoleh skor 13 poin dan menempati peringkat kedua. Isu ini juga penting, namun urgensinya masih berada di bawah penegakan perda reklame. Adapun isu “Belum adanya kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang mengganggu jalan nasional” mendapat skor 12 poin dan berada pada peringkat ketiga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa core issue yang diprioritaskan adalah belum optimalnya sistem penegakan Perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD, karena berdampak langsung terhadap ketertiban umum, keindahan kota, dan potensi hilangnya pendapatan daerah akibat reklame ilegal.

C. Analisis Core Isu

Setelah ditetapkan core isu, yaitu “Belum optimalnya sistem penegakan perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD” dengan skor tertinggi 16. Selanjutnya isu ini dianalisis menggunakan metode *fish bone* untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang berkontribusi terhadap permasalahan tersebut serta memahami keterkaitan sebab-akibat antar faktor.



Gambar 3.1 Diagram fish bone analisis core issue

Berdasarkan diagram *fish bone* diatas, Masalah utama tersebut dianalisis dengan empat faktor penyebab utama, yaitu Metode, Manajemen, Material, dan SDM. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Metode

Belum adanya program penyuluhan yang terstruktur terkait aturan reklame. Akibatnya, masyarakat maupun pelaku usaha belum memahami secara baik aturan penegakan reklame.

2. Manajemen

Belum adanya monitoring rutin terhadap pelaksanaan perda reklame. Hal ini mengakibatkan pengawasan kurang konsisten dan menimbulkan celah bagi pelanggaran reklame ilegal.

3. Material

Belum adanya sarana digital yang digunakan sebagai media informasi. Informasi tentang regulasi reklame kurang tersosialisasi, sehingga transparansi dan kemudahan akses masyarakat terbatas.

4. SDM

Belum adanya penyampaian informasi berbasis digital oleh petugas. Potensi teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga sosialisasi lebih banyak dilakukan secara konvensional dan jangkauannya terbatas.

Dari uraian diagram fishbone tersebut dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya sistem penegakan perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD bukan hanya karena lemahnya tindakan lapangan, tetapi juga disebabkan faktor internal organisasi seperti metode penyuluhan yang belum berjalan, manajemen pengawasan yang belum konsisten, keterbatasan sarana digital, serta SDM yang belum memaksimalkan teknologi informasi.

Dengan demikian, perbaikan tidak hanya perlu difokuskan pada penindakan, tetapi juga pada perbaikan metode, manajemen, penyediaan sarana, dan peningkatan kapasitas SDM.

D. Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Untuk mengatasi permasalahan belum optimalnya sistem penegakan perda tentang reklame yang menyebabkan rendahnya PAD di kabupaten kerinci, dibutuhkan gagasan kreatif yang mampu menjawab akar masalah tersebut yaitu tidak adanya penyuluhan dan belum tersedianya sarana digital di instansi Satpopp Kabupaten Kerinci, dari dua gagasan kreatif tersebut yang dapat segera diwujudkan adalah pembuatan media sosial atau website sebagai sarana untuk penyelenggaraan penyuluhan berbasis digital

Kedua gagasan ini saling melengkapi, media sosial atau website sebagai sarana informasi dan penyuluhan sebagai sarana penyampaian informasi, dengan penerapan kedua gagasan ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan penyelenggara reklame terhadap peraturan daerah kabupaten kerinci.

Dengan langkah-langkah kreatif tersebut, akan dilakukan “*Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci*” dalam waktu singkat kegiatan penyuluhan berbasis digital ini dapat dikenal luas oleh masyarakat banyak terutama penyelenggara reklame. Upaya ini juga menjadi landasan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mewujudkan kerinci yang berdaya saing, maju dan sejahtera.

BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan aktualisasi, diperlukan penyusunan jadwal yang terstruktur agar setiap tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadwal kegiatan ini memuat urutan aktivitas yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, serta keterkaitan antar kegiatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Tabel berikut menggambarkan matriks jadwal kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan penulis selama masa habituasi:.

Tabel 4. 1 Jadwal Aktualisasi Kegiatan

NO	Kegiatan	September				Oktober	
		I	II	III	IV	I	II
1	Pelaksanaan Konsultasi dengan Pimpinan						
2	Pelaksanaan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di (BPKPD) Kabupaten Kerinci						
3	Pelaksanaan Patroli ke lapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak						
4	Pelaksanaan penyuluhan digital penegakan perda tentang reklame						
5	Pelaksanaan evaluasi hasil patroli terhadap penyelenggara reklame						
6	Pembuatan Laporan						

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	: SATPOLPP KABUPATEN KERINCI
Identifikasi Isu	: 1. Belum Optimalnya sistem penegakan Perda tentang Reklame yang menyebabkan rendahnya PAD 2. Belum adanya kegiatan patroli rutin terhadap siswa bolos 3. Belum adanya kegiatan penertiban terhadap PKL yang mengganggu jalan nasional
Isu yang diangkat	: Belum optimalnya sistem penegakan Perda tentang Reklame yang menyebabkan rendahnya PAD
Gagasan Pemecahan Isu	: Optimalisasi Program “ Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA)” di Kabupaten Kerinci
Judul	: Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan Digital dan peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci.

4.2 tabel matrik pelaksanaan aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan substansi mata pelatihan (BerAKHLAK)	Stakeholder Terkait	Potensi Konflik	Solusi Konflik	Keterangan
1	Pelaksanaan Konsultasi dengan Pimpinan terkait Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci	Membuat Nota Dinas	Nota Dinas dan Dokumentasi	Akuntabel : Saya telah menyusun Nota Dinas dengan penuh tanggung jawab, sesuai aturan dan fakta yang ada. Kompeten : saya telah memastikan isi nota dinas jelas, rapi dan dapat dipahami Adaptif : saya telah menyesuaikan isi nota dinas sesuai kebutuhan dan perkembangan situasi terkini	Pimpinan, Mentor, Peserta dan tata Usaha	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan terkait optimalisasi program penegakan Perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA), maka dilakukan komunikasi terbuka untuk menyamakan persepsi dengan cara harmonis. dan melibatkan pihak penengah guna menghasilkan keputusan yang adil dan tetap menjaga kelancaran pelaksanaan program PRADA di Kabupaten Kerinci.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam kegiatan konsultasi dengan pimpinan melalui sikap pelayanan yang responsif, akuntabel dalam pelaporan, dan kompeten dalam penyusunan data. Konsultasi dilakukan secara harmonis, loyal terhadap arahan pimpinan, adaptif terhadap inovasi digital, serta kolaboratif antarinstansi untuk mendukung optimalisasi program penegakan perda tentang reklame di Kabupaten Kerinci.
		Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan	Catatan hasil Konsultasi dan Dokumentasi	Harmonis : Saya telah menghormati pimpinan dengan komunikasi yang santun dan saling menghargai pendapat. Loyal : Saya telah melakukan konsultasi dengan pimpinan dengan penuh kesetiaan, mendukung arahan dan kebijakan pimpinan Kolaboratif : saya telah membangun kerja sama yang baik dengan pimpinan				

		Membuat surat persetujuan	Surat persetujuan dan Dokumentasi	Berorientasi Pelayanan: Saya telah membuat surat persetujuan dari pimpinan agar memudahkan dalam melaksanakan pelayanan terhadap penyelenggara reklame terkait PRADA Akuntabel : Saya telah memastikan surat persetujuan ditandatangani sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten : Saya telah membuat surat persetujuan dengan teliti dan menggunakan bahasa yang jelas.				
2	Pelaksanaan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci	Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan terkait dengan pendataan terhadap penyelenggara reklame Membuat instrumen pendataan Melakukan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan	Catatan hasil Konsultasi dan Dokumentasi Formulir pendataan dan Dokumentasi Hasil Pendataan dan dokumentasi	Harmonis : Saya telah berkomunikasi dengan sopan dan menghargai arahan pimpinan. Loyal : Saya telah melakukan konsultasi dengan pimpinan dengan penuh kesetiaan, mendukung arahan dan kebijakan pimpinan Kolaboratif : Saya telah bekerja sama dengan pimpinan dan tim agar pendataan berjalan lancar. Kompeten : Saya telah menyusun instrumen pendataan dengan teliti, jelas, dan mudah dipahami. Akuntabel : Saya telah memastikan instrumen sesuai aturan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Adaptif : Saya telah menyusun instrumen pendataan dengan fleksibel. Kolaboratif : saya telah membangun kerjasama yang baik dengan pihak BPKPD dalam melakukan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak.	Pimpinan, Peserta, BPKPD, dan Staf ASN Lainnya	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di BPKPD Kabupaten Kerinci, maka dilakukan koordinasi dan klarifikasi secara terbuka untuk menyamakan data serta memahami perbedaan persepsi. Jika diperlukan, melibatkan pimpinan atau pihak penengah agar tercapai kesepahaman dan pendataan dapat berjalan akurat serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam pelaksanaan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di BPKPD Kabupaten Kerinci melalui sikap pelayanan yang ramah dan solutif, akuntabel dalam pencatatan data, serta kompeten dalam memahami ketentuan pajak reklame. Kegiatan dilaksanakan secara harmonis dan kolaboratif dengan rekan kerja maupun instansi terkait, disertai loyalitas pada arahan pimpinan serta adaptif terhadap penggunaan sistem digital pendataan untuk mendukung peningkatan kepatuhan pajak reklame di daerah.

		Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci		Harmonis : saya telah menjalin komunikasi yang sopan dengan sikap yang ramah dengan BPKPD pada saat melakukan pendataan. Berorientasi Pelayanan : saya telah melakukan pendataan dengan transparan agar mendukung kepatuhan penyelenggara reklame terhadap pajak				
3	Pelaksanaan Patroli ke lapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak	Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan terkait pelaksanaan patroli ke lapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak Membentuk tim untuk pelaksanaan patroli ke lapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak Melakukan patroli ke lapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak	Catatan hasil Konsultasi dan Dokumentasi Daftar nama tim patroli dan Dokumentasi Catatan hasil patroli dan Dokumentasi	Harmonis : Saya telah berkomunikasi dengan sopan dan menghargai arahan pimpinan. Loyal : Saya telah setia mendukung arahan dan kebijakan yang baik dari pimpinan Kolaboratif : Saya telah bekerja sama dengan pimpinan dan tim agar patroli berjalan lancar. Kolaboratif : Saya telah membentuk tim patroli untuk membangun kerjasama yang baik dilapangan pada saat patroli. Akuntabel : Saya telah menyusun pembagian tugas dalam tim patroli agar anggota tim mempertanggungjawabkan pekerjaanya. Harmonis : Saya telah menjaga sikap humanis dan baik pada saat patroli dan menghormati penyelenggara reklame. Adaptif : saya telah melaksanakan patroli dengan metode pendekatan sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan	Pimpinan, Mentor, Peserta, Tim Patroli dan Penyelenggara Reklame	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan patroli ke lapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak, maka dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyamakan tujuan serta prosedur pelaksanaan. Jika diperlukan, melibatkan pimpinan atau instansi pendukung guna memastikan kegiatan patroli berjalan kondusif, transparan, dan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam kegiatan patroli lapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak melalui sikap pelayanan yang sopan dan tegas, akuntabel dalam pelaporan hasil patroli, serta kompeten dalam mengenali pelanggaran sesuai ketentuan perda. Patroli dilaksanakan secara harmonis dan kolaboratif antartugas serta instansi terkait, dengan loyalitas pada arahan pimpinan dan adaptif terhadap penggunaan teknologi lapangan untuk mendukung penegakan perda reklame di Kabupaten Kerinci.

				Kompeten : Saya telah meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan patroli di lapangan Berorientasi Pelayanan : Saya telah memberikan informasi kemudahan pelayanan pajak reklame kepada penyelenggara reklame pada saat patroli.				
4	Pelaksanaan penyuluhan digital penegakan perda tentang reklame	Membuat akun digital berupa media sosial Membuat Poster Digital sesuai dengan perda tentang reklame Melakukan penyuluhan digital dengan Mengunggah Poster Digital perda tentang reklame	Akun Instagram dan Dokumentasi Poster Digital dan Dokumentasi Unggahan Poster Digital dan Dokumentasi	Kompeten : Saya telah memanfaatkan kemampuan digital untuk mengelola akun media sosial secara profesional. Akuntabel : saya telah membuat akun media sosial yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Loyal : Saya telah membuat poster digital sesuai dengan perda tentang reklame sebagai bentuk dukungan dan kesetiaan pada tugas serta kebijakan pimpinan.. Adaptif : Saya telah menyesuaikan pembuatan poster digital perda reklame dengan perkembangan teknologi digital agar dapat disebarluaskan secara lebih efektif. Berorientasi pelayanan : Saya telah melakukan penyuluhan digital dengan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Harmonis : Saya telah mengunggah informasi dengan narasi yang santun kepada masyarakat. Kolaboratif : Saya telah bekerja sama dengan rekan kerja dan pihak terkait dalam melaksanakan penyuluhan digital agar informasi tersampaikan lebih luas dan tepat sasaran.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kerinci, Mentor, Peserta dan Staf ASN Lainnya	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan penyuluhan digital penegakan Perda tentang reklame, maka dilakukan komunikasi terbuka dengan pihak terkait untuk menyelaraskan pemahaman dan strategi pelaksanaan. Jika diperlukan, melibatkan pimpinan atau tim teknis guna menemukan solusi yang efektif agar kegiatan penyuluhan tetap berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam kegiatan penyuluhan digital penegakan perda tentang reklame melalui sikap pelayanan yang informatif dan responsif, akuntabel dalam penyampaian materi serta pelaporan kegiatan, dan kompeten dalam memanfaatkan media digital. Kegiatan dilaksanakan secara harmonis dan kolaboratif dengan instansi terkait, menunjukkan loyalitas pada kebijakan pimpinan serta adaptif terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak reklame di Kabupaten Kerinci.

5	Pelaksanaan evaluasi hasil patroli	Menyiapkan instrumen atau format evaluasi hasil patroli	Format evaluasi hasil patroli dan Dokumentasi	Akuntabel : Saya telah membuat format evaluasi hasil patroli dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kompeten : Saya telah menggunakan kemampuan analisis untuk menyiapkan instrumen atau format evaluasi agar mudah dipahami. Adaptif : Saya telah menyesuaikan Format dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan instansi.	Pimpinan, Mentor, Peserta dan Staf ASN Lainnya	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan evaluasi hasil patroli, maka dilakukan klarifikasi dan komunikasi terbuka antara tim pelaksana dan pimpinan untuk menyamakan persepsi terhadap temuan di lapangan. Jika diperlukan, melibatkan pihak penengah agar hasil evaluasi tetap objektif, transparan, dan dapat menjadi dasar perbaikan kegiatan selanjutnya.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam kegiatan evaluasi hasil patroli melalui sikap pelayanan yang objektif dan solutif, akuntabel dalam penyusunan laporan evaluasi, serta kompeten dalam menganalisis data temuan di lapangan. Kegiatan dilaksanakan secara harmonis dan kolaboratif dengan tim serta instansi terkait, menunjukkan loyalitas terhadap arahan pimpinan dan adaptif dalam memanfaatkan teknologi evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan perda reklame di Kabupaten Kerinci.
		Mengadakan rapat evaluasi bersama tim	Daftar hadir dan Dokumentasi	Harmonis : saya telah menjaga suasana rapat tetap kondusif dengan menghargai setiap pendapat peserta rapat. Kolaboratif : saya telah bekerja sama dengan seluruh peserta rapat untuk menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi instansi dan masyarakat.				
		Melaporkan hasil evaluasi patroli kepada pimpinan	Laporan hasil evaluasi dan Dokumentasi	Berorientasi Pelayanan : saya telah menyampaikan laporan hasil evaluasi dengan lengkap kepada pimpinan demi untuk kepentingan bersama Loyal : saya telah mendukung penuh kebijakan pimpinan dengan melaporkan hasil evaluasi secara tepat waktu sebagai bentuk kesetiaan pada tugas				

6	Pembuatan Laporan	Menyusun laporan awal kegiatan	Draft laporan awal dan Dokumentasi	Kompeten : saya telah Menyusun laporan secara sistematis berdasarkan hasil kegiatan Akuntabel : saya telah bertanggung jawab terhadap keakuratan isi laporan	Pimpinan, Mentor, dan Peserta.	Ya	Apabila terjadi konflik dalam pelaksanaan pembuatan laporan, maka dilakukan koordinasi dan komunikasi terbuka untuk menyamakan format, isi, dan data yang digunakan. Jika diperlukan, melibatkan pimpinan atau tim verifikasi agar laporan yang dihasilkan akurat, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Nilai BerAKHLAK diterapkan dalam kegiatan pembuatan laporan melalui sikap pelayanan yang teliti dan responsif terhadap kebutuhan informasi pimpinan, akuntabel dalam penyajian data dan hasil kegiatan, serta kompeten dalam menyusun laporan yang sistematis dan mudah dipahami. Kegiatan ini dilaksanakan secara harmonis dan kolaboratif antaranggota tim, menunjukkan loyalitas pada arahan pimpinan, serta adaptif terhadap penggunaan teknologi digital untuk mendukung transparansi dan efektivitas pelaporan penegakan perda reklame di Kabupaten Kerinci.
		Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan	Catatan hasil Konsultasi dan Dokumentasi	Loyal : saya telah menyampaikan laporan sebagai bentuk komitmen terhadap tujuan instansi Kolaboratif : saya telah menerima masukan dari pimpinan untuk penyempurnaan dokumen Harmonis : saya telah menjalin komunikasi yang baik selama proses konsultasi				
		Menyempurnakan laporan akhir sebagai dokumentasi resmi	Laporan akhir siap unggah /publikasi dan Dokumentasi	Adaptif : saya telah memperbaiki laporan sesuai masukan dan kebutuhan organisasi Berorientasi pelayanan : saya telah menjadikan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap masyarakat				

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK)

Untuk memastikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK dapat diinternalisasi secara konsisten dalam setiap kegiatan, maka disusunlah matrik rekapitulasi rencana habituasi. Matrik ini menggambarkan keterkaitan antara mata pelatihan dengan kegiatan habituasi yang dilakukan, serta jumlah aktualisasi yang dicapai pada masing-masing nilai. Dengan demikian, tabel ini menjadi acuan dalam memantau sejauh mana implementasi nilai BerAKHLAK telah terintegrasi dalam aktivitas sehari-hari selama masa habituasi.

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi realisasi habituasi NND PNS berdasarkan nilai-nilai BerAKHLAK:

4.3 tabel Matrik Rekapitulasi Rencana Habitiasi NND PNS (BerAKHLAK)

No	Mata Pelatihan	Kegiatan						Jumlah Aktualisasi Per MP
		Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6	
1	Berorientasi Pelayanan	1	1	1	1	1	1	6
2	Akuntabel	2	1	1	1	1	1	7
3	Kompeten	2	1	1	1	1	1	7
4	Harmonis	1	2	2	1	1	1	8
5	Loyal	1	1	1	1	1	1	6
6	Adaptif	1	1	1	1	1	1	6
7	Kolaboratif	1	2	2	1	1	1	8
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		9	9	9	7	7	7	48

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Berikut disajikan Tabel Capaian Penyelesaian Core Isu, yang menggambarkan hasil nyata dari Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci.

4.4 tabel kondisi core isu

Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi
Koordinasi antar instansi yang lemah antara Satpol PP dan BPKPD sehingga tindak lanjut pelanggaran perda reklame berjalan lambat, banyaknya reklame yang tidak terdata ($\pm 30\%$) dan belum tersedianya media informasi digital untuk penyuluhan terkait perda reklame yang masih dilakukan secara konvensional sehingga informasi tidak tersebar luas dan belum menjangkau masyarakat terutama penyelenggara reklame, serta kepatuhan wajib pajak reklame yang rendah karena kurangnya pemahaman mengenai aturan dan prosedur dalam pembayaran pajak reklame ($\pm 50\%$).	Terjalannya koordinasi dengan BPKPD dalam mendukung proses peningkatan Pajak Reklame Untuk Daerah (PRADA), data reklame meningkat ($\pm 80\%$) dan tersedianya media penyuluhan digital dengan dibuatnya akun media sosial resmi berupa instagram untuk mengunggah poster digital perda tentang reklame yang menjadikan penyuluhan lebih efektif, informatif dan mudah diakses masyarakat luas terutama penyelenggara reklame, serta dengan adanya penyuluhan digital tersebut pemahaman mengenai aturan dalam penyelenggaraan reklame menjadi lebih baik ($\pm 80\%$).

E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

1) Individu Penulis

- a. Meningkatkan pemahaman tentang pajak reklame melalui peraturan daerah.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam mengelola akun media sosial resmi untuk menyampaikan informasi publik.
- c. Menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam mendukung peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA).

2) Instansi

- a. Meningkatkan citra instansi sebagai lembaga yang transparan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- b. Meningkatkan efisiensi dengan adanya penyuluhan digital.
- c. Mendorong kerjasama yang berkelanjutan dengan instansi lain dalam rangka peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA).

3) Stakeholder

- a. Mempermudah akses informasi pelayanan publik.
- b. Meningkatkan transparansi layanan publik sehingga kepercayaan masyarakat makin tinggi.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat penyelenggara reklame dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Berikut merupakan rencana tindak lanjut hasil Aktualisasi Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci.

4.5 tabel tindak lanjut hasil aktualisasi

No	Kegiatan	Output	Durasi dan waktu	Pihak yang terlibat	Sumber biaya	ket
1.	Penyuluhan digital lanjutan melalui akun media sosial resmi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kerinci	Penyebaran unggahan berisi peraturan daerah	6 bulan	Kepala Seksi Trantibum, Admin dan staf ASN lainnya	APBD	-
2.	Pengawasan / monitoring rutin terhadap penyelenggara reklame	Laporan hasil pengawasan / monitoring rutin	1 tahun	BPKPD dan Satpol PP Kab.Kerinci	APBD	-
3.	Penertiban terhadap wajib pajak reklame yang tidak taat pajak	Laporan hasil penertiban	1 tahun	BPKPD, Satpol PP, Babinsa, Babin Kabtibmas	APBD	-

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pelaksanaan aktualisasi ini merupakan upaya strategis untuk memperkuat peran ASN dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan daerah, khususnya dalam bidang ketertiban umum dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sebelum pelaksanaan aktualisasi, kegiatan penyuluhan tentang perda reklame masih terbatas pada metode konvensional, yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak dan lemahnya penegakan peraturan di lapangan. Melalui program aktualisasi ini, perubahan signifikan terjadi baik dari sisi sistem kerja, penggunaan teknologi, maupun perilaku kerja ASN yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, target output dari kegiatan ini adalah 5 (Lima) penyelenggara reklame yang sebelumnya belum taat menjadi patuh dalam membayar pajak reklame, sebagai bentuk nyata peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah.

Kegiatan ini membuktikan bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme dan efektivitas kerja, nilai Berorientasi Pelayanan, terlihat dari upaya memberikan kemudahan dan transparansi informasi kepada penyelenggara reklame melalui media digital. Akuntabel, dengan penyusunan nota dinas, laporan, dan surat persetujuan sesuai aturan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, melalui kemampuan

menyusun instrumen pendataan dan mengelola media digital secara efektif dan informatif. Harmonis, dengan menjalin komunikasi yang sopan, menghargai pimpinan dan rekan kerja. Loyal, melalui komitmen dan kesetiaan dalam mendukung kebijakan pimpinan serta pelaksanaan perda tentang reklame. Adaptif, dengan menyesuaikan strategi penyuluhan menggunakan platform digital yang relevan dengan perkembangan zaman. Kolaboratif, melalui kerja sama antara Satpol PP, BPKPD, dan stakeholder lain dalam meningkatkan kepatuhan pajak reklame. Secara keseluruhan, penerapan nilai BerAKHLAK dalam kegiatan ini memperkuat citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi, direkomendasikan agar penyelenggara pelatihan dapat terus meningkatkan kualitas program pembelajaran dan pendampingan bagi peserta. Pelatihan aktualisasi sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemahaman teori nilai-nilai BerAKHLAK dan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga memberikan ruang praktik yang lebih luas bagi peserta untuk mengimplementasikan inovasi sesuai konteks tugas dan tantangan di instansi masing-masing.

Selain itu, instansi asal peserta disarankan untuk menindaklanjuti hasil aktualisasi dengan menjadikannya sebagai contoh praktik baik (best practice) dalam peningkatan kinerja organisasi. Dengan penerapan

rekomendasi ini, diharapkan instansi mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, memperkuat integritas pegawai, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, keberhasilan aktualisasi ini bukan hanya menjadi pencapaian individu peserta, tetapi juga menjadi bagian dari upaya kolektif instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2017). Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kementerian PANRB. (2021). *Core values ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN Bangsa Melayani Bangsa*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- LAN RI. (2023). Modul pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.\
- Pemerintah Kabupaten Kerinci. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 21.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia.(2018). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang *Satuan Polisi Pamong Praja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 37.

LAMPIRAN

LAPORAN MINGGU KE - I

Kegiatan : Pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan terkait Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci

Tahapan kegiatan : Membuat Nota Dinas

Rincian Nilai BerAKHLAK :

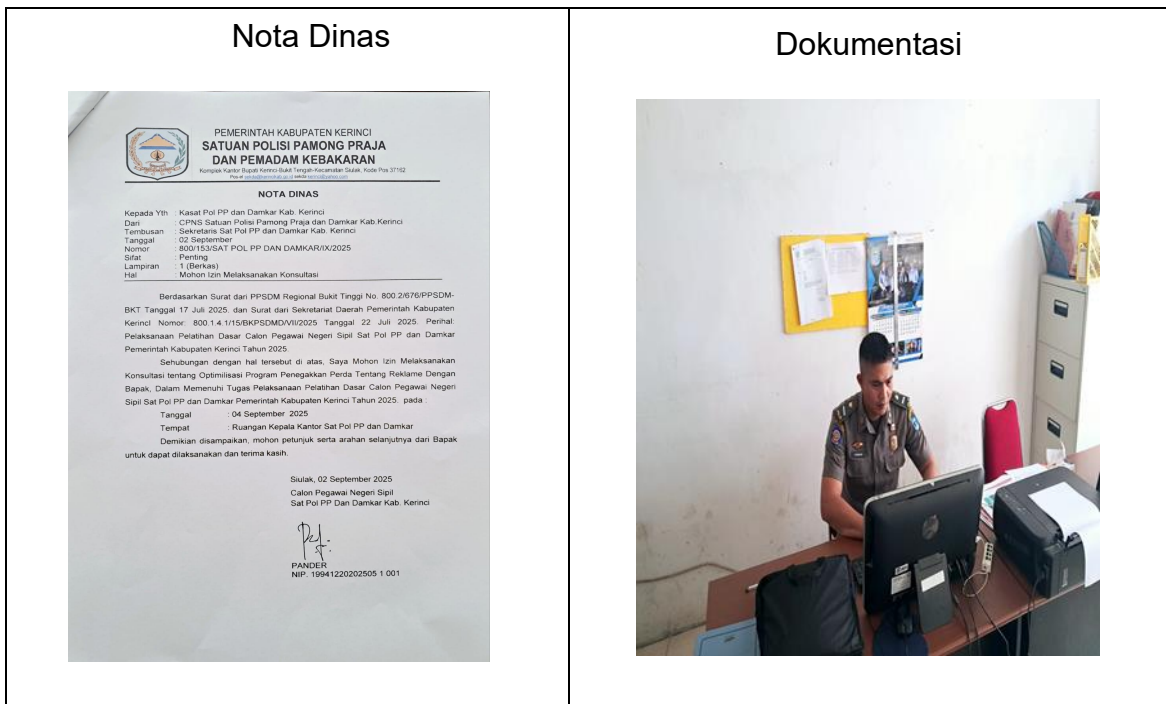
Sebagai bagian dari proses aktualisasi, penulis melaksanakan kegiatan konsultasi dengan pimpinan untuk mendiskusikan langkah awal dalam Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci. Adapun tahapan kegiatan pertama yang dilakukan adalah membuat nota dinas.

Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini, penulis menerapkan nilai **Akuntabel**, yaitu menyusun nota dinas dengan penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan aturan yang berlaku. setiap informasi yang dituangkan harus jelas, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menunjukkan bahwa nota dinas bukan hanya sekedar dokumen administratif, tetapi juga bentuk komitmen untuk memberikan dasar pertimbangan yang kuat dalam pengambilan keputusan.

Penulis juga menerapkan nilai **Kompeten**, dengan kemampuan menyusun nota dinas secara jelas dan mudah dipahami, serta mengikuti format administrasi yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa isi nota dinas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **Adaptif**, yaitu dengan menyesuaikan isi nota dinas dengan perkembangan situasi terkini. Hal ini menjadikan nota dinas yang dibuat selalu relevan, dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika nilai berAKHLAK, khususnya **Akuntabel**, **Kompeten**, dan **Adaptif** tidak diterapkan, maka nota dinas yang dibuat berisiko tidak sesuai fakta, sulit dipertanggungjawabkan, serta menurunkan kepercayaan pimpinan maupun organisasi. Selain itu, penyusunan yang tidak kompeten akan menghasilkan dokumen yang tidak rapi, kurang jelas, dan sulit dipahami sehingga berpotensi menimbulkan salah tafsir dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi, tanpa sikap adaptif, isi nota dinas akan ketinggalan zaman, tidak sesuai kebutuhan, serta kehilangan relevansi terhadap situasi terkini. Kondisi ini dapat menghambat kelancaran administrasi, melemahkan komunikasi internal, dan menurunkan kualitas kinerja organisasi.

- Kegiatan : Pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan terkait Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci**
- Tahapan kegiatan : Melakukan konsultasi dengan pimpinan**

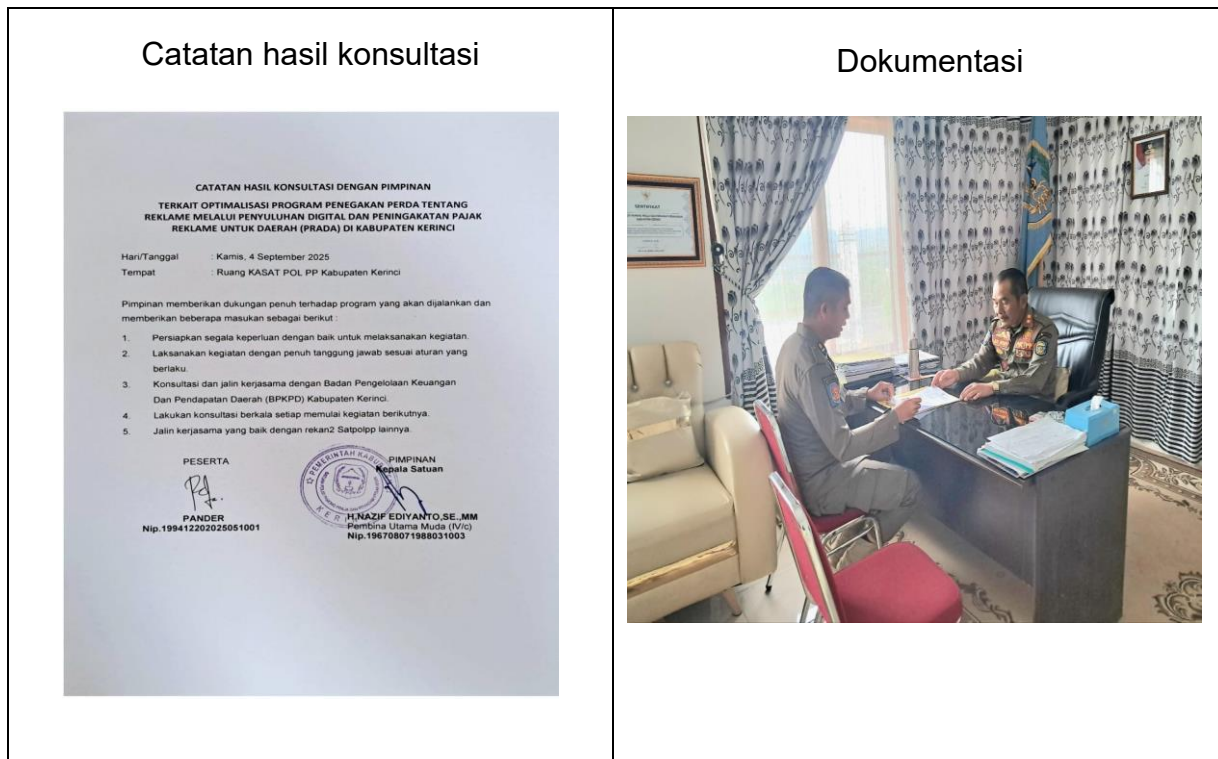
Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci, penulis menjunjung tinggi nilai **Harmonis**, yaitu ketika komunikasi dilakukan dengan penuh rasa hormat, sopan dan santun. Dalam proses tersebut, pegawai menjaga sikap saling menghargai, mendengarkan arahan dengan baik, Sikap harmonis ini menciptakan suasana kerja yang nyaman, memperkuat hubungan antara pegawai dengan pimpinan, serta mendukung terciptanya keputusan yang selaras dengan tujuan organisasi.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **Loyal**, yang tercermin dengan sikap taat pada aturan, setia mendukung keputusan, serta siap melaksanakan arahan dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini menumbuhkan kepercayaan pimpinan dan memperkuat kebersamaan dalam mencapai tujuan organisasi.

Nilai **Kolaboratif** juga sangat perlu dalam kegiatan konsultasi dengan pimpinan yaitu ketika pegawai mampu bekerja sama secara aktif, terbuka, dan saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, pegawai tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi berupaya membangun kerja sama, Agar suasana konsultasi menjadi lebih produktif, keputusan yang dihasilkan lebih tepat, dan tujuan organisasi dapat dicapai.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila nilai **Harmonis**, **Loyal**, dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam kegiatan konsultasi dengan pimpinan, maka proses komunikasi yang seharusnya berjalan lancar akan menjadi kaku. Tidak adanya sikap harmonis dapat merusak suasana kerja, bahkan menimbulkan jarak antara pimpinan dan pegawai. Tanpa adanya loyalitas, arahan maupun keputusan pimpinan bisa diabaikan sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dan melemahkan komitmen dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, jika sikap kolaboratif tidak ditunjukkan, konsultasi akan berlangsung satu arah, serta menghambat tercapainya solusi yang efektif. Dampak keseluruhannya adalah menurunnya kualitas hubungan kerja, lemahnya koordinasi, dan terhambatnya pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

- Kegiatan : Pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan terkait Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci**
- Tahapan kegiatan : Membuat Surat Persetujuan**

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam pembuatan surat persetujuan untuk pelaksanaan Optimalisasi Program penegakan perda tentang reklame melalui penyuluhan digital dan peningkatan pajak reklame untuk daerah (PRADA) di kabupaten kerinci, penulis menerapkan nilai **BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan**, yang mana nilai ini tercermin dalam penyusunan surat persetujuan yang dibuat dengan jelas dan sesuai prosedur agar memudahkan para penyelenggara reklame dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga memperhatikan kemudahan terhadap pihak yang dilayani.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **BerAKHLAK Akuntabel**, yaitu dengan memastikan seluruh isi dan proses penyusunan surat persetujuan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Setiap langkah dilakukan secara cermat agar surat yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.

Nilai **Kompeten** juga perlu diterapkan dalam tahapan kegiatan ini yang mana dalam membuat surat persetujuan harus disusun dengan teliti serta menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketelitian diperlukan agar tidak ada kesalahan data maupun redaksi, sementara penggunaan bahasa yang tepat memastikan maksud surat tersampaikan dengan baik kepada pihak yang dituju. Agar menjadi efektif sebagai instrumen komunikasi resmi yang mendukung kelancaran pelayanan publik.

Bukti output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika penulis tidak menerapkan nilai **BerAKHLAK** dalam tahapan kegiatan membuat surat persetujuan tersebut, maka dokumen yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai prosedur dan sulit dipahami. Tanpa nilai **Berorientasi Pelayanan**, penerbitan surat bisa menghambat kelancaran urusan penyelenggara reklame serta menurunkan kepuasan masyarakat. Jika nilai **Akuntabel** diabaikan, surat persetujuan rawan mengandung kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, tanpa nilai **Kompeten**, surat yang dibuat cenderung tidak rapi, kurang jelas, dan membingungkan sehingga menimbulkan salah tafsir. Keseluruhan dampak tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik, integritas instansi, dan menurunnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan.

LAPORAN MINGGU KE- 2

- Kegiatan : Pelaksanaan Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci**
- Tahapan kegiatan : Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan Terkait Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame**

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam kegiatan Pelaksanaan Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, penulis memulai tahapan kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan pimpinan, adapun **Nilai BerAKHLAK** yang diterapkan adalah menjunjung tinggi nilai **Harmonis**, yaitu melalui komunikasi yang dilakukan dengan penuh rasa saling menghargai dan sopan santun. Dalam proses ini, pegawai mendengarkan arahan pimpinan dengan seksama, menyampaikan laporan secara jelas, serta menjaga etika dalam berkomunikasi sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **Loyal**, dengan menunjukkan kesetiaan dan komitmen penuh untuk melaksanakan arahan yang diberikan terkait pendataan terhadap penyelenggara reklame. Dalam proses ini, penulis harus mendukung keputusan pimpinan dengan sikap taat pada aturan dan siap menindaklanjuti instruksi. Sikap loyal ini memperkuat kepercayaan pimpinan pada saat melakukan kegiatan pendataan.

Nilai **Kolaboratif** tercermin ketika pegawai dan pimpinan aktif bekerja sama, terbuka dalam bertukar informasi, serta saling melengkapi untuk menghasilkan data penyelenggara reklame yang akurat. Sikap kolaboratif ini membuat proses pendataan menjadi lebih efektif.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila nilai **Harmonis**, **Loyal** dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam tahapan kegiatan konsultasi dengan pimpinan terkait pendataan terhadap penyelenggara reklame maka kegiatan tersebut berisiko berjalan kurang efektif. Tanpa sikap **harmonis**, komunikasi menjadi kaku, rawan menimbulkan kesalahpahaman, dan hubungan kerja bisa terganggu. Jika **loyalitas** tidak dijalankan, arahan pimpinan berpotensi diabaikan sehingga pendataan tidak sesuai harapan dan menurunkan tingkat kepercayaan. Sementara itu, tanpa **kolaborasi**, proses konsultasi cenderung berjalan satu arah dan kurang menghasilkan solusi yang tepat. Dampak keseluruhannya adalah data penyelenggara reklame menjadi tidak akurat, dan pengelolaan terhadap penyelenggara reklame sulit di optimalkan.

Kegiatan : Pelaksanaan Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci

Tahapan kegiatan : Membuat Instrumen Pendataan

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam membuat instrumen pendataan, penulis menerapkan nilai **BerAKHLAK Kompeten**, yang mana nilai tersebut tampak dalam penyusunan instrumen pendataan yang dilakukan dengan teliti, jelas, dan mudah dipahami. Dengan ketelitian dan penggunaan bahasa yang jelas, instrumen menjadi praktis digunakan, menghasilkan data yang akurat, serta mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan secara tepat.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **BerAKHLAK Akuntabel**, yang mana dalam membuat instrumen pendataan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pimpinan maupun terhadap publik. dan instrumen pendataan tersebut tidak hanya sah secara administrasi, tetapi juga valid secara substansi. sehingga kepercayaan terhadap hasil pendataan tetap terjaga.

Nilai **Adaptif** juga perlu diterapkan dalam tahapan kegiatan ini yaitu dilakukan secara fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi terkini. sehingga dapat menyesuaikan indikator maupun pertanyaan yang diperlukan tanpa mengurangi ketepatan data. Dengan sikap adaptif, instrumen pendataan menjadi lebih relevan, responsif terhadap perubahan, dan tetap mampu menghasilkan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Bukti output :

Formulir Pendataan					
FORMULIR PENDATAAN TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAJ PAJAK					
No.	Nama Pemilik Reklame	Nama Reklame	Ukuran Reklame	Alamat Reklame	Iklan Yang Terpasang
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

PESERTA

PANDER
Nip.199412202025051001

MENTOR

KUSAINI,S.Sos
Nip.198203102008011002

Dokumentasi



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika penulis tidak menerapkan nilai **BerAKHLAK Kompeten, Akuntabel, dan Adaptif** dalam membuat instrumen pendataan, maka instrumen yang dihasilkan berisiko tidak valid, membingungkan, dan sulit digunakan di lapangan. Tanpa nilai kompeten, instrumen dapat disusun dengan tidak teliti, bahasanya kurang jelas, sehingga menimbulkan salah tafsir. Jika nilai akuntabel diabaikan, instrumen tidak sesuai aturan, tidak berbasis data yang benar, dan sulit dipertanggungjawabkan. Sementara itu, tanpa nilai adaptif, instrumen menjadi kaku, tidak relevan dengan kebutuhan sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Keseluruhan dampaknya adalah hasil pendataan menjadi tidak berkualitas, kepercayaan terhadap data menurun, dan pengambilan keputusan berpotensi salah arah.

- Kegiatan : Pelaksanaan Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci**
- Tahapan kegiatan : Melakukan pendataan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci**

Rincian Nilai BerAKHLAK :

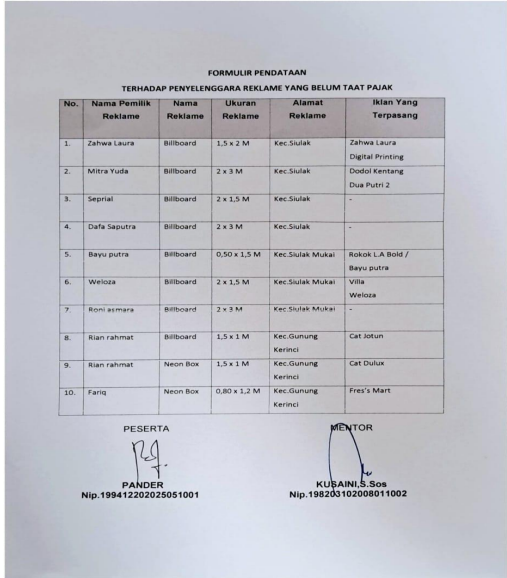
Dalam kegiatan Pelaksanaan Pendataan terhadap Penyelenggara Reklame yang belum taat pajak di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang baik dengan pihak BPKPD. Pendekatan ini diwujudkan melalui koordinasi yang intensif dan saling berbagi informasi, Dengan adanya kolaborasi yang baik proses pendataan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan agar mempermudah upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak reklame.

penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Harmonis**, ditunjukkan dengan menjalin komunikasi yang sopan, santun, dan menjaga sikap ramah bersama pihak BPKPD. Pendekatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Dengan keharmonisan, proses pendataan akan berjalan lebih lancar, dan dapat menghasilkan data yang akurat untuk peningkatan kepatuhan pajak terhadap penyelenggara reklame.

Nilai Berorientasi Pelayanan juga diterapkan dalam kegiatan ini yaitu dengan melaksanakan proses pendataan secara transparan, jelas, dan mudah dipahami. Dengan penerapan nilai ini, pendataan tidak hanya menghasilkan data yang akurat, tetapi juga untuk mendorong kesadaran penyelenggara reklame , sehingga mendukung terciptanya tata kelola pajak yang lebih tertib dan adil.

Bukti Output :

Hasil Pendataan



No.	Nama Pemilik Reklame	Nama Reklame	Ukuran Reklame	Alamat Reklame	Bisnis Yang Terpasang
1.	Zahwa Laura	Billboard	1,5 x 2 M	Kec.Sulak	Zahwa Laura Digital Printing
2.	Mitra Yuda	Billboard	2 x 3 M	Kec.Sulak	Dodol Kentang Dua Putri 2
3.	Septrial	Billboard	2 x 1,5 M	Kec.Sulak	-
4.	Dafa Saputra	Billboard	2 x 3 M	Kec.Sulak	-
5.	Bayu putra	Billboard	0,50 x 1,5 M	Kec.Sulak Mukai	Rokok LA Bold / Bayu putra
6.	Welozia	Billboard	2 x 1,5 M	Kec.Sulak Mukai	Villa Welozia
7.	Roni asmara	Billboard	2 x 3 M	Kec.Sulak Mukai	-
8.	Rian rahmat	Billboard	1,5 x 1 M	Kec.Gumung Kerinci	Cat totun
9.	Rian rahmat	Neon Box	1,5 x 1 M	Kec.Gumung Kerinci	Cat Dulux
10.	Fariq	Neon Box	0,80 x 1,2 M	Kec.Gumung Kerinci	Fres's Mart

PESERTA

[Signature]

PANDER

Nip.199412202025051001

MENTOR

[Signature]

KUSAINI, S. Sos

Nip.198203102008011002

Dokumentasi



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila nilai **Kolaboratif, Harmonis, dan Berorientasi Pelayanan** tidak diterapkan dalam kegiatan pendataan terhadap penyelenggara reklame, maka proses pendataan berisiko mengalami hambatan yang serius. Tanpa kolaborasi, koordinasi menjadi lemah sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Jika nilai harmonis diabaikan, komunikasi yang tidak sopan dan kurang ramah dapat menimbulkan kesalahpahaman. dan tanpa berorientasi pelayanan, proses pendataan cenderung tidak transparan, membingungkan, dan tidak membantu penyelenggara reklame memahami kewajiban pajaknya. Dampak akhirnya adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak reklame, serta terganggunya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak reklame.

LAPORAN MINGGU KE- 3

Kegiatan : Pelaksanaan Patroli kelapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak

Tahapan kegiatan : Melakukan Konsultasi dengan Pimpinan terkait pelaksanaan patroli kelapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam kegiatan Pelaksanaan Patroli kelapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak, penulis memulai tahapan kegiatan dengan melakukan konsultasi dengan pimpinan, adapun **Nilai BerAKHLAK** yang diterapkan adalah menjunjung tinggi nilai **Harmonis**, yaitu dengan menjalin komunikasi yang sopan, santun, serta menunjukkan sikap menghargai setiap arahan pimpinan. Dengan penerapan nilai ini, tercipta suasana konsultasi yang kondusif dan saling menghargai antara bawahan dan pimpinan, sehingga pelaksanaan patroli ke lapangan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **Loyal**, yaitu dengan menunjukkan sikap mendukung arahan dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan serta melaksanakan instruksi dengan penuh tanggung jawab. Dengan sikap loyal tersebut, kepercayaan pimpinan dapat terjaga, koordinasi berjalan lancar, dan pelaksanaan patroli di lapangan semakin efektif dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak reklame.

Nilai **Kolaboratif** tercermin dengan membangun kerja sama yang baik, serta aktif mendengarkan arahan pimpinan dengan mengajak pihak terkait untuk berperan bersama dalam menyukkseskan kegiatan ini. Dengan sikap kolaboratif, konsultasi menjadi wadah untuk menyatukan persepsi dan menghasilkan keputusan yang lebih tepat sehingga patroli dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai tujuan organisasi.

Bukti Output :

Catatan hasil konsultasi	Dokumentasi
	

Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila nilai **Harmonis**, **Loyal** dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam tahapan kegiatan konsultasi dengan pimpinan, maka proses koordinasi berpotensi berjalan tidak efektif. Tanpa sikap harmonis, komunikasi bisa menjadi tidak sopan bahkan menimbulkan kesalahpahaman antara bawahan dan pimpinan. Jika nilai loyal diabaikan, arahan pimpinan berisiko tidak dijalankan dengan baik, dan melemahkan integritas dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, tanpa adanya kolaborasi, kerja sama melemah, dan keputusan yang diambil kurang optimal. Dampak akhirnya adalah pelaksanaan patroli kelapangan menjadi tidak terarah, efektivitas menurun, serta tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak reklame sulit tercapai.

- Kegiatan : Pelaksanaan Patroli kelapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak**
- Tahapan kegiatan : Membentuk tim untuk pelaksanaan patroli kelapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak**

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam Membentuk tim untuk pelaksanaan patroli, penulis menerapkan nilai **BerAKHLAK Kolaboratif** yang tercermin dengan membangun kerja sama yang baik bersama tim di lapangan, saling mendukung, dan mengutamakan koordinasi agar patroli berjalan efektif dan terarah. Dengan adanya kolaborasi, tugas di lapangan dapat dibagi secara adil, serta tercipta kekompakan yang mendorong kelancaran pelaksanaan patroli. Sikap ini tidak hanya memperkuat soliditas tim, tetapi juga meningkatkan keberhasilan dalam menertibkan penyelenggaraan reklame sesuai aturan yang berlaku.

Selain itu penulis juga menerapkan nilai **BerAKHLAK Akuntabel**, yaitu dengan memastikan setiap tugas dan tanggung jawab anggota tim ditetapkan sesuai prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah dalam pelaksanaan patroli dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan penerapan nilai ini, hasil patroli dapat dipercaya, serta meningkatkan integritas tim dalam menegakkan kepatuhan penyelenggaraan reklame.

Bukti output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika penulis tidak menerapkan nilai **BerAKHLAK Kolaboratif** dan **Akuntabel** dalam pembentukan tim patroli, maka kinerja tim berisiko tidak terarah dan hasil patroli sulit dipertanggungjawabkan. Tanpa akuntabilitas, pembagian tugas menjadi tidak jelas, laporan patroli tidak transparan, dan keputusan yang diambil dapat menyimpang dari aturan. Jika kolaborasi diabaikan, koordinasi antar anggota melemah, komunikasi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan konflik internal. Dampaknya, patroli kelapangan tidak berjalan optimal, data yang diperoleh tidak akurat, penertiban reklame tidak maksimal, dan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak reklame sulit tercapai.

Kegiatan : Pelaksanaan Patroli kelapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak
Tahapan kegiatan : Melakukan Patroli kelapangan terhadap Penyelenggara reklame yang belum taat pajak

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan kegiatan melakukan patroli kelapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Harmonis** yaitu dengan menjaga sikap humanis dan saling menghormati. Petugas menegakkan aturan dengan tegas namun tetap mengedepankan etika dan kesantunan dalam berinteraksi dengan penyelenggara reklame maupun masyarakat sekitar. Dengan sikap harmonis ini, pelaksanaan patroli dapat menciptakan suasana yang kondusif serta mengurangi potensi konflik.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Adaptif**, yaitu dengan menerapkan metode pendekatan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Petugas mampu menyesuaikan cara melakukan tindakan secara persuasif, agar tidak menimbulkan gesekan yang tidak perlu. Dengan sikap adaptif ini, patroli menjadi lebih fleksibel.

Nilai BerAKHLAK Kompeten juga perlu diterapkan dengan melaksanakan tugas secara profesional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta menggunakan bahasa yang jelas dalam menyampaikan informasi kepada penyelenggara reklame. Dengan penerapan nilai ini, penegakan aturan dapat dilakukan secara tepat serta berintegritas.

Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan juga tercermin dalam tahapan kegiatan ini dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Petugas tidak hanya melakukan Patroli, tetapi juga berperan aktif membantu penyelenggara reklame dengan menjelaskan prosedur pembayaran pajak reklame, agar dapat mendorong terciptanya kesadaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pajak reklame.

Bukti Output :

Catatan Hasil Patroli	Dokumentasi
	

Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila **Nilai BerAKHLAK Harmonis, Adaptif, Kompeten, dan Berorientasi Pelayanan** tidak diterapkan dalam tahapan kegiatan ini, maka pelaksanaan patroli akan menghadapi banyak kendala. Tanpa nilai harmonis, akan rawan menimbulkan konflik dan suasana patroli tidak kondusif. Jika adaptif tidak dijalankan, petugas tidak mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lapangan, sehingga patroli tidak efektif. Tanpa kompetensi, pelaksanaan patroli berisiko tidak profesional, data yang diperoleh tidak akurat, dan prosedur tidak dijalankan sesuai aturan. Sementara itu, tanpa berorientasi pelayanan, patroli cenderung tidak memberikan solusi atau informasi yang membantu penyelenggara reklame memenuhi kewajiban pajaknya. Dampak akhirnya adalah gagalnya upaya meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

LAPORAN MINGGU KE- 4

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Digital Penegakan Perda tentang Reklame.

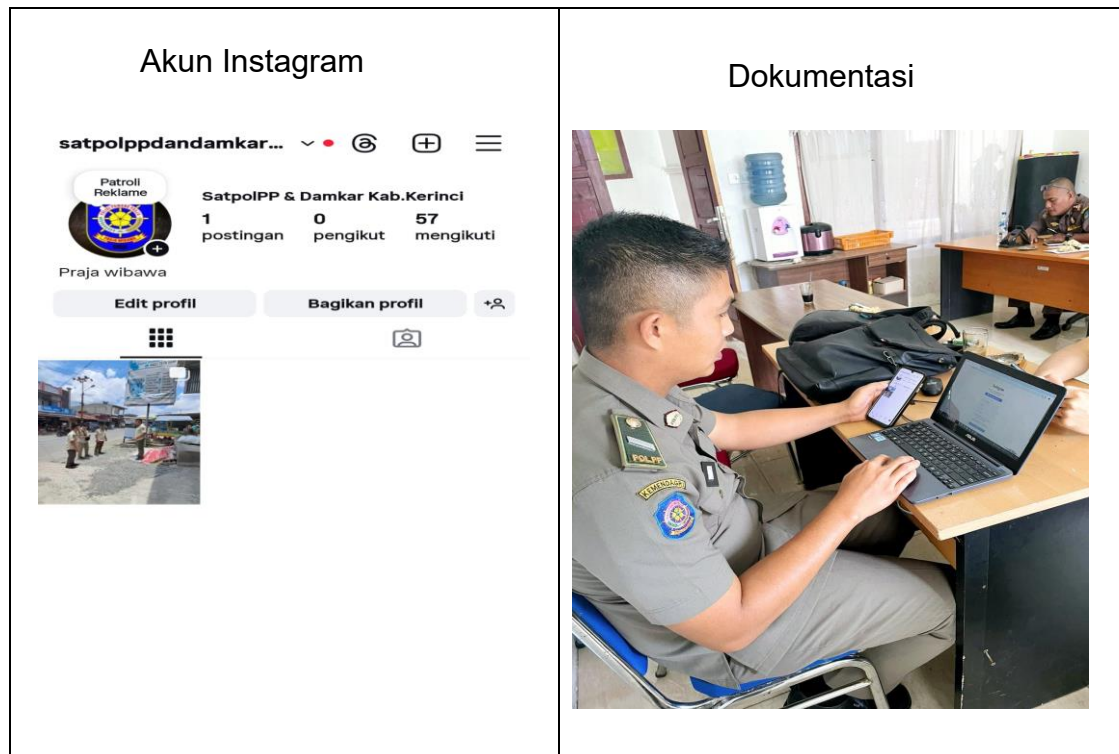
Tahapan kegiatan : Membuat Akun Digital berupa Media Sosial

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam kegiatan Pelaksanaan penyuluhan digital penegakan perda tentang reklame, penulis memulai tahapan kegiatan dengan membuat akun digital berupa media sosial, adapun **Nilai BerAKHLAK** yang diterapkan adalah **Kompeten** yaitu dengan membuat akun media sosial berupa Instagram dan memanfaatkannya secara profesional. Kompetensi ditunjukkan melalui kemampuan memahami tata cara pembuatan akun yang benar, menyusun profil dengan jelas dan menarik sesuai kebutuhan dan nama organisasi. Dengan pemanfaatan keterampilan digital tersebut, akun Instagram tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga sarana komunikasi yang efektif dan kredibel untuk mendukung penyebaran informasi serta meningkatkan citra positif organisasi di mata publik.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Akuntabel** yang tercermin dalam tahapan kegiatan membuat akun digital berupa media sosial dengan membuat akun Instagram yang dikelola sesuai aturan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sikap ini, akun Instagram tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan tanggung jawab organisasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila **Nilai BerAKHLAK Kompeten** dan **Akuntabel** tidak diterapkan dalam membuat dan mengelola akun digital berupa Instagram, maka akun berisiko tidak dikelola secara profesional dan kurang dapat dipercaya. Tanpa kompetensi, akun bisa dibuat dengan asal-asalan, tampilan kurang menarik, konten tidak jelas, bahkan sulit dipahami oleh masyarakat. Jika akuntabilitas diabaikan, akun berpotensi menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta, tidak transparan, dan sulit dipertanggungjawabkan. Dampaknya, akun kehilangan kredibilitas, kepercayaan publik menurun, serta tujuan pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pelayanan informasi tidak tercapai secara optimal.

Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Digital Penegakan Perda tentang Reklame.

Tahapan kegiatan : Membuat Poster Digital sesuai dengan Perda tentang Reklame

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan digital penegakan perda tentang reklame, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Loyal** yang tercermin dalam tahapan kegiatan membuat poster digital sesuai Perda tentang reklame sebagai bentuk dukungan dan kesetiaan pada tugas serta kebijakan pimpinan. Loyalitas ditunjukkan melalui kesediaan melaksanakan arahan pimpinan dengan penuh tanggung jawab, menjaga integritas, serta memastikan bahwa poster yang dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan sikap ini, poster digital tidak hanya menjadi media sosialisasi, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan serta komitmen untuk mendukung keberhasilan kebijakan pimpinan dan organisasi.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Adaptif** yang tercermin dalam tahapan kegiatan membuat poster digital sesuai Perda tentang reklame dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital agar dapat disebarluaskan secara lebih efektif kepada masyarakat. yang ditunjukkan melalui kemampuan menyesuaikan desain, format, dan media penyebaran sesuai tren digital terkini, sehingga pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan. Dengan sikap ini, poster digital tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga alat komunikasi publik yang responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Bukti output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila **Nilai BerAKHLAK Loyal** dan **Adaptif** tidak diterapkan dalam kegiatan membuat poster digital, maka proses sosialisasi Perda tentang reklame berisiko tidak berjalan efektif. Tanpa loyalitas, hasil poster mungkin tidak sesuai arahan pimpinan ataupun kebijakan organisasi, sehingga terkesan asal dibuat dan tidak mencerminkan dukungan terhadap tugas yang diemban. Sementara itu, tanpa sikap adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, poster sulit menjangkau masyarakat luas karena terbatas pada cara penyebaran konvensional, sehingga pesan tidak sampai secara optimal. Dampaknya, tujuan sosialisasi perda reklame tidak tercapai, tingkat kepatuhan penyelenggara reklame rendah, dan kredibilitas instansi berpotensi menurun di mata publik.

- Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Digital Penegakan Perda tentang Reklame.**
- Tahapan kegiatan : Melakukan Penyuluhan Digital dengan mengunggah Poster Digital Perda tentang Reklame**

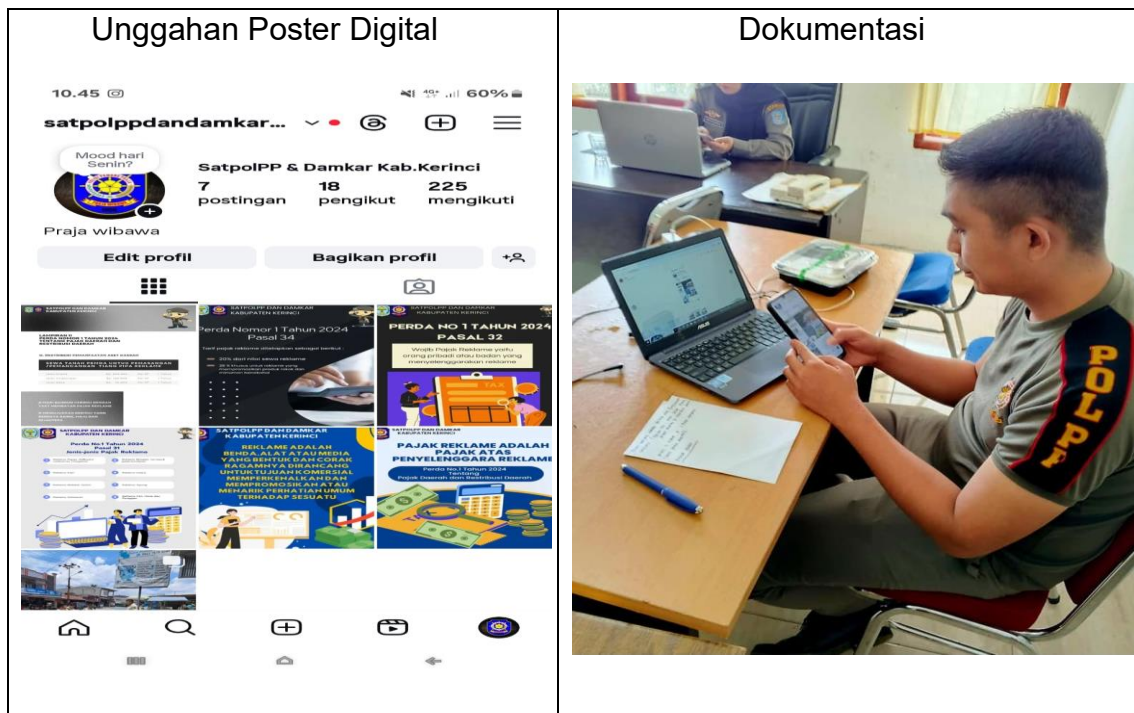
Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan kegiatan melakukan penyuluhan digital dengan mengunggah poster digital perda tentang reklame, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan** yaitu dengan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat melalui konten digital. Pelayanan ditunjukkan dengan menghadirkan konten yang jelas dan mudah dipahami, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang tepat terkait aturan reklame. Dengan sikap ini, penyuluhan tidak hanya menjadi sarana sosialisasi, tetapi juga wujud nyata pelayanan publik yang transparan dan edukatif.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Harmonis** yang tercermin dengan menyajikan informasi secara santun, komunikatif, dan menghargai keberagaman masyarakat. Penyampaian konten dilakukan dengan bahasa yang positif, tidak menyinggung pihak mana pun, serta berupaya menciptakan pemahaman bersama. Dengan sikap ini, penyuluhan menjadi lebih diterima oleh masyarakat, menumbuhkan suasana yang kondusif, serta memperkuat hubungan baik antara instansi dan publik dalam mendukung kepatuhan terhadap aturan reklame.

Nilai BerAKHLAK Kolaboratif juga tercermin melalui kerja sama yang baik antarpegawai maupun dengan pihak terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan tepat sasaran. Kolaborasi ditunjukkan dengan saling berbagi ide dalam pembuatan konten, serta mendukung satu sama lain agar penyuluhan digital berjalan efektif. Dengan sikap ini, penyuluhan digital berdampak luas bagi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan reklame.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Apabila **Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan, Harmonis** dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam tahapan penyuluhan digital melalui unggahan poster digital, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat berpotensi tidak jelas, tidak bermanfaat, bahkan menimbulkan kebingungan. Ketiadaan orientasi pelayanan membuat penyuluhan tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat, sehingga pesan yang diharapkan tidak tersampaikan dengan baik. Tidak adanya sikap harmonis dapat menimbulkan miskomunikasi, kesalahpahaman, dan suasana kerja yang tidak kondusif antarpegawai maupun dengan pihak terkait. Sementara itu, ketiadaan kolaborasi akan menghambat proses pembuatan dan penyebaran poster, menurunkan kualitas konten, serta mengurangi jangkauan informasi yang seharusnya bisa lebih luas. Akibatnya, tujuan penyuluhan digital untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan reklame tidak tercapai secara optimal.

LAPORAN MINGGU KE- 5

Kegiatan : Pelaksanaan Evaluasi hasil patroli
Tahapan kegiatan : Menyiapkan instrumen atau format Evaluasi hasil patroli

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam kegiatan Pelaksanaan evaluasi hasil patroli, penulis memulai tahapan kegiatan dengan menyiapkan instrumen atau format evaluasi hasil patroli, adapun **Nilai BerAKHLAK** yang diterapkan adalah **Akuntabel** yaitu ditunjukkan dengan sikap penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memastikan setiap data dan informasi yang dituangkan dalam format evaluasi sesuai prosedur, benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan integritas dan kejujuran sehingga hasil evaluasi dapat menjadi dasar yang valid.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Kompeten** yang tercermin dari kemampuan menyusun format secara teliti, rapi, dan sistematis dengan memperhatikan kaidah yang jelas serta mudah dipahami. Dengan kompetensi tersebut, format evaluasi dapat digunakan secara efektif sebagai acuan dalam menilai hasil patroli dan menjadi pedoman yang berkualitas bagi pengambilan keputusan pimpinan.

Nilai BerAKHLAK Adaptif diwujudkan dengan kemampuan menyesuaikan isi dan bentuk format sesuai kebutuhan organisasi serta perkembangan situasi di lapangan. Dengan sikap fleksibel, format evaluasi dapat diperbarui atau disesuaikan agar tetap relevan, responsif, dan mampu mendukung efektivitas pelaporan hasil patroli secara optimal.

Bukti Output :

Format evaluasi				
EVALUASI KEGIATAN HASIL PATROLI				
Hari/Tanggal : _____				
Tempat : _____				
NO.	KEGIATAN	JENIS REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN
1.				
KESIMPULAN : _____				
REKOMENDASI TINDAK LANJUT : _____				
1. _____				
PESERTA		MENTOR		
PANDER Nip.199412202025051001		KUSAINI,S.Sos Nip.198203102008011002		

Dokumentasi



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika **Nilai BerAKHLAK Akuntabel, Kompeten, dan Adaptif** tidak diterapkan dalam tahap kegiatan menyiapkan format evaluasi hasil patroli, Apabila nilai akuntabel tidak diterapkan, format evaluasi yang disusun bisa menjadi tidak sesuai prosedur, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan berpotensi menimbulkan keraguan dalam penggunaannya. Jika nilai kompeten diabaikan, format yang dihasilkan bisa kurang teliti, tidak rapi, sulit dipahami, sehingga menyulitkan proses penilaian dan tindak lanjut. Sedangkan tanpa nilai adaptif, format evaluasi berisiko kaku, tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi, sehingga hasilnya tidak relevan untuk kondisi lapangan. Akumulasi dari hal ini dapat menyebabkan laporan patroli menjadi kurang valid, bahkan menurunkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggara reklame.

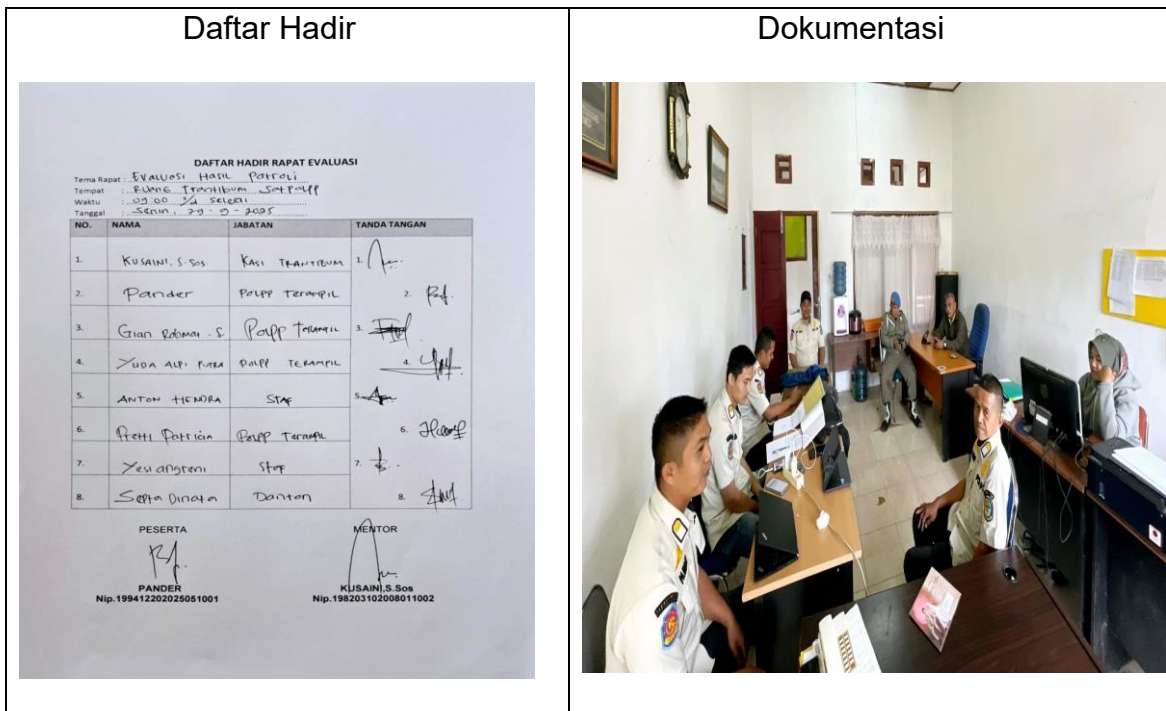
Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi hasil patroli
Tahapan kegiatan : Mengadakan rapat evaluasi bersama tim

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan kegiatan mengadakan rapat evaluasi bersama tim, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Harmonis**, yang diwujudkan dengan menjaga suasana rapat tetap kondusif, membangun komunikasi yang baik, serta saling menghargai setiap pendapat yang disampaikan anggota tim. Sikap ini mendorong terciptanya kebersamaan, keterbukaan, dan rasa saling menghormati sehingga hasil rapat lebih efektif, obyektif, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Kolaboratif** yang tercermin dari semangat membangun kerja sama yang baik antar anggota tim, saling mendukung dalam menyampaikan masukan, serta menggabungkan ide-ide untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas. Dengan sikap kolaboratif, rapat evaluasi menjadi sarana kebersamaan yang memperkuat sinergi tim dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara lebih efektif.

Bukti output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Berikut dampak jika **Nilai BerAKHLAK Harmonis** dan **Kolaboratif** tidak diterapkan dalam tahapan kegiatan mengadakan rapat evaluasi bersama tim:

Tanpa nilai harmonis, rapat dapat berlangsung dalam suasana tegang, tidak kondusif, bahkan memunculkan konflik akibat kurangnya sikap saling menghargai. Hal ini berpotensi menimbulkan perpecahan atau ketidaknyamanan dalam tim. Sementara tanpa nilai kolaboratif, rapat evaluasi bisa berjalan secara sepihak, kurang partisipasi, serta minim ide-ide kreatif yang seharusnya lahir dari kerja sama. Dampak akhirnya adalah hasil rapat yang tidak optimal, keputusan yang kurang berkualitas, dan melemahkan efektivitas tim dalam menjalankan tugas organisasi.

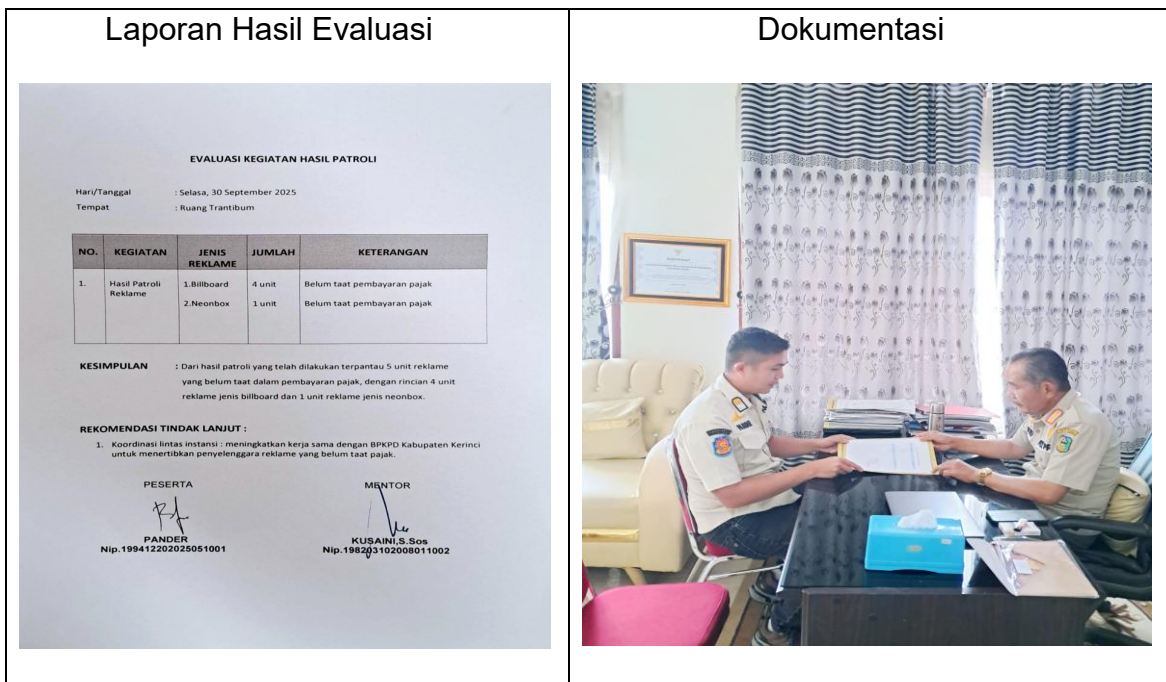
Kegiatan : Pelaksanaan evaluasi hasil patroli
Tahapan kegiatan : Melaporkan hasil evaluasi patroli kepada Pimpinan

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan kegiatan melaporkan hasil evaluasi patroli kepada pimpinan, penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan** yaitu diwujudkan dengan menyampaikan laporan secara lengkap, jelas, dan tepat waktu demi kepentingan bersama. Sikap ini mencerminkan komitmen untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam memahami hasil evaluasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Selain itu penulis juga menerapkan **Nilai BerAKHLAK Loyal** yang diwujudkan dengan menunjukkan kesetiaan terhadap tugas dan arahan pimpinan melalui penyampaian laporan yang benar, objektif, dan sesuai prosedur. Sikap ini mencerminkan dedikasi serta komitmen untuk mendukung kebijakan pimpinan secara konsisten demi kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Berikut dampak jika **Nilai BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan** dan **Loyal** tidak diterapkan dalam tahapan kegiatan melaporkan hasil evaluasi patroli kepada pimpinan, Apabila nilai berorientasi pelayanan tidak dilakukan, laporan yang disampaikan bisa tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan bersama. Sementara jika nilai loyal diabaikan, laporan bisa menjadi tidak objektif, asal dibuat, atau tidak sesuai prosedur, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan pimpinan terhadap pelaksana tugas. Dampaknya, proses tindak lanjut dari hasil patroli menjadi terhambat, efektivitas organisasi menurun, dan tujuan pelayanan kepada masyarakat tidak tercapai dengan baik.

LAPORAN MINGGU KE - 6

Kegiatan : Pembuatan Laporan

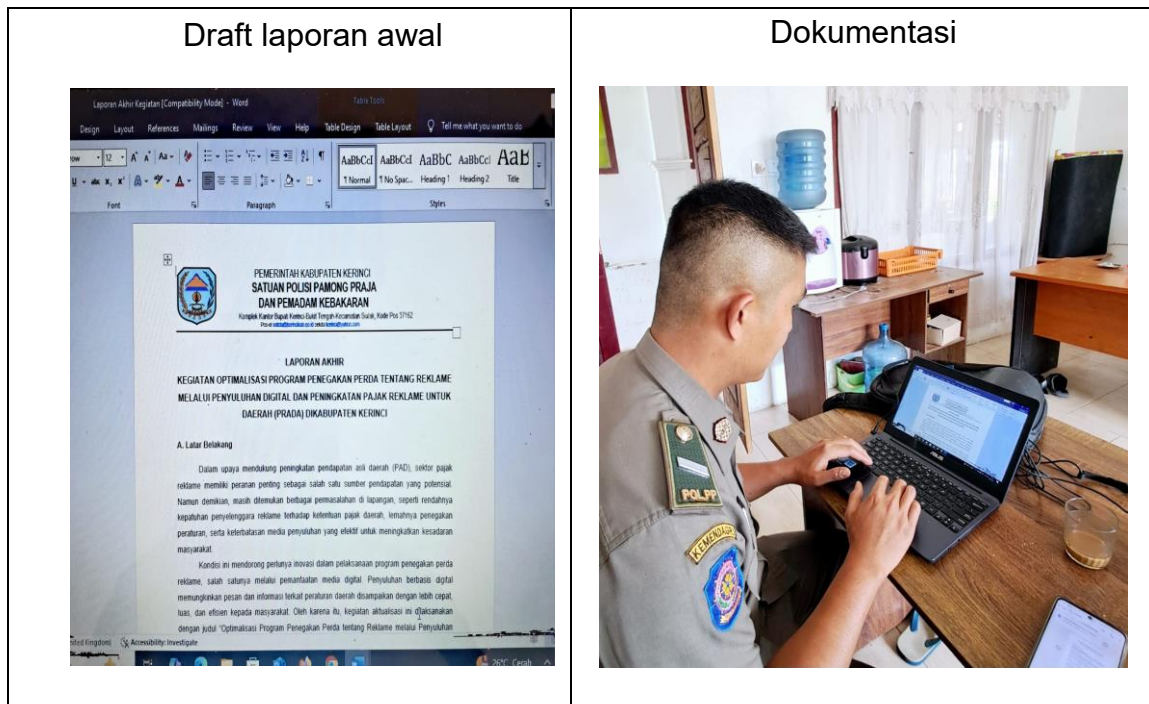
Tahapan kegiatan : Menyusun laporan awal kegiatan

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Nilai BerAKHLAK Kompeten tercermin dalam penyusunan laporan yang dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap bagian laporan disusun dengan struktur yang jelas dan mencerminkan alur logis pelaksanaan kegiatan. Kemampuan teknis dan pemahaman terhadap substansi kegiatan digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang informatif dan mudah dipahami. Penyusunan laporan secara kompeten memastikan bahwa hasil kerja terdokumentasi dengan baik dan dapat dijadikan referensi untuk evaluasi atau pengambilan keputusan berikutnya.

Nilai Akuntabel juga terlihat dari tanggung jawab penuh terhadap keakuratan setiap isi laporan. Setiap informasi, data, maupun kesimpulan yang dicantumkan telah diverifikasi dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sikap akuntabel ini menunjukkan integritas dalam bekerja, serta membangun kepercayaan terhadap hasil laporan yang disusun. Laporan menjadi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun administratif. Kombinasi nilai kompeten dan akuntabel menjadikan laporan tidak hanya rapi secara tampilan, tetapi juga kuat secara isi. Laporan tersebut mampu menjawab kebutuhan informasi dengan valid dan tepat sasaran, serta menjadi alat pertanggungjawaban yang sah terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika nilai **Kompeten** tidak diterapkan, laporan yang disusun berisiko tidak sistematis, membingungkan, dan tidak mencerminkan kegiatan yang sebenarnya. Kurangnya kompetensi dalam penyusunan laporan juga dapat menurunkan kualitas dokumentasi kegiatan, sehingga menghambat upaya perbaikan dan pengambilan keputusan di masa mendatang. Sementara itu, tanpa penerapan nilai **Akuntabel**, isi laporan bisa mengandung data yang tidak akurat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berisiko menciptakan persepsi negatif terhadap pelaksana kegiatan. Ketidakakuratan dalam laporan dapat berdampak serius, seperti hilangnya kepercayaan pimpinan, dan kesalahan dalam kebijakan yang diambil berdasarkan laporan tersebut.

Kegiatan : Pembuatan Laporan

Tahapan kegiatan : Melakukan Konsultasi dengan pimpinan

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam tahapan melakukan konsultasi dengan pimpinan **Nilai BerAKHLAK Loyal** diwujudkan dengan menyampaikan laporan sebagai bentuk komitmen terhadap tujuan instansi. Laporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud dukungan terhadap arah kebijakan dan program kerja organisasi. Sikap ini memperlihatkan bahwa kontribusi individu diarahkan untuk memperkuat kinerja bersama dan menjaga konsistensi arah organisasi.

Selain itu **Nilai Kolaboratif** tercermin dari keterbukaan dalam menerima masukan dari pimpinan untuk penyempurnaan dokumen. Masukan tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas laporan, bukan sebagai kritik semata. Dengan membangun komunikasi dua arah, laporan menjadi lebih tajam, lengkap, dan relevan. Kolaborasi juga membuka ruang diskusi yang konstruktif antara pelaksana kegiatan dan pimpinan, sehingga tercipta pemahaman yang lebih dalam terhadap substansi laporan.

Nilai Harmonis tampak dalam upaya menjalin komunikasi yang baik selama proses konsultasi. Komunikasi dilakukan dengan bahasa yang sopan, menghargai pendapat, dan menjaga etika profesionalisme. Suasana kerja yang harmonis memudahkan proses klarifikasi, penyampaian informasi, maupun pengambilan keputusan. Sikap saling menghormati ini tidak hanya memperlancar proses penyusunan laporan, tetapi juga memperkuat hubungan kerja yang positif dan berkelanjutan.

Bukti Output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika **Nilai BerAKHLAK Loyal**, tidak diterapkan dalam penyusunan laporan maka bisa kehilangan arah dan tidak mencerminkan kepentingan institusi. Laporan menjadi sekadar formalitas, tanpa memperhatikan kualitas atau relevansi terhadap misi organisasi. Hal ini dapat merugikan instansi karena laporan tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk evaluasi atau perencanaan kebijakan berikutnya, Jika **Nilai Kolaboratif** dan **Harmonis** diabaikan, proses penyusunan laporan berpotensi menimbulkan miskomunikasi dan penolakan terhadap masukan yang membangun. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara tim pelaksana dan pimpinan, serta menghambat penyempurnaan dokumen.

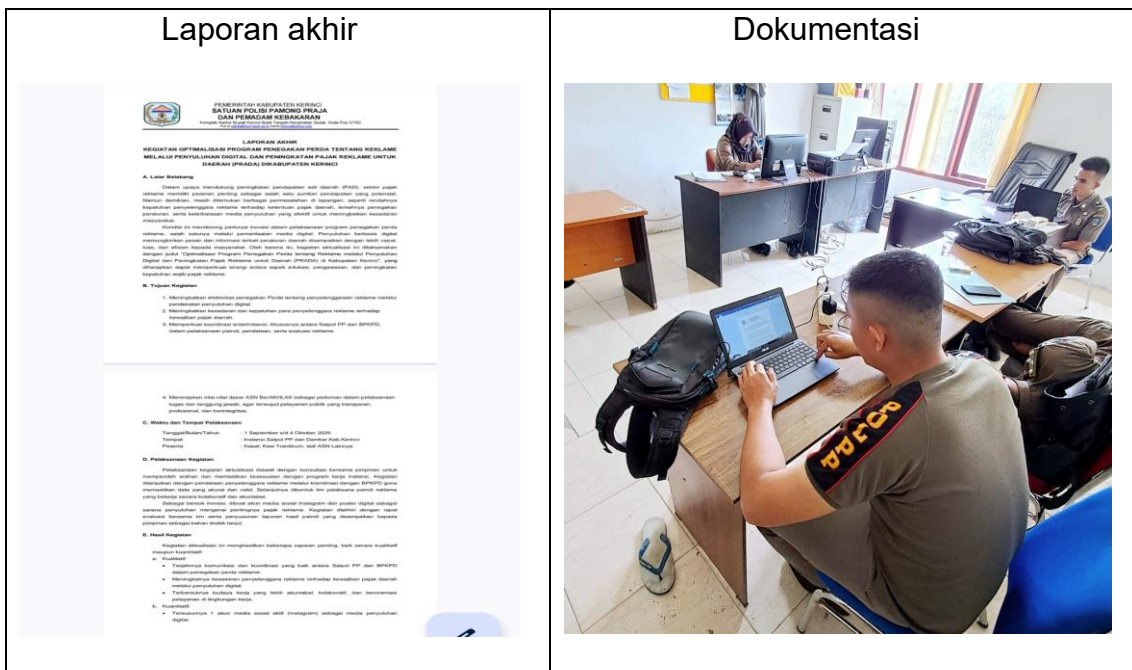
Kegiatan : Pembuatan Laporan
Tahapan kegiatan : Menyempurnakan laporan akhir sebagai Dokumentasi resmi

Rincian Nilai BerAKHLAK :

Dalam menyempurnakan laporan akhir sebagai dokumentasi resmi penulis menerapkan **Nilai BerAKHLAK Adaptif** yang tercermin dari kesiapan dalam memperbaiki laporan berdasarkan masukan dan kebutuhan organisasi. Perubahan bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas dokumen, laporan yang dihasilkan selalu relevan, akurat, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan internal organisasi.

Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan menjadikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Setiap informasi disusun agar mudah dipahami dan dapat diakses jika dibutuhkan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Hal ini selaras dengan prinsip pelayanan publik yang akuntabel dan responsif terhadap hak masyarakat untuk mengetahui kinerja pemerintah. Dengan mengintegrasikan kedua nilai tersebut, laporan menjadi lebih dari sekadar dokumen formal, tetapi juga sarana strategis untuk membangun komunikasi yang sehat antara instansi dan pemangku kepentingan dan mampu menjawab kebutuhan internal sekaligus memperkuat citra positif organisasi di mata publik.

Bukti output :



Dampak jika tidak dilakukan :

Jika **Nilai BerAKHLAK Adaptif** tidak diterapkan, laporan bisa menjadi statis dan tidak mencerminkan kondisi serta kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Hal ini dapat menyebabkan laporan kehilangan relevansi, tidak responsif terhadap masukan, serta gagal menjawab tantangan aktual. Akibatnya, laporan menjadi kurang bermanfaat sebagai bahan evaluasi maupun dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, tanpa **Nilai Berorientasi Pelayanan**, laporan bisa disusun dengan orientasi semata-mata administratif, tanpa memperhatikan aspek transparansi dan keterbukaan kepada publik. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Laporan yang tidak informatif atau sulit diakses juga melemahkan peran instansi dalam membangun partisipasi publik.

LAMPIRAN

DOKUMEN

Lampiran Kegiatan 1



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Komplek Kantor Bupati Kerinci-Bukit Tengah-Kecamatan Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el: sekda@kerincikab.go.id sekda.kerinci@yahoo.com

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kasat Pol PP dan Damkar Kab. Kerinci
Dari : CPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kab. Kerinci
Tembusan : Sekretaris Sat Pol PP dan Damkar Kab. Kerinci
Tanggal : 02 September
Nomor : 800/153/SAT POL PP DAN DAMKAR/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Berkas)
Hal : Mohon Izin Melaksanakan Konsultasi

Berdasarkan Surat dari PPSDM Regional Bukit Tinggi No. 800.2/676/PPSDM-BKT Tanggal 17 Juli 2025. dan Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci Nomor: 800.1.4.1/15/BKPSDMD/VII/2025 Tanggal 22 Juli 2025. Perihal: Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sat Pol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saya Mohon Izin Melaksanakan Konsultasi tentang Optimalisasi Program Penegakkan Perda Tentang Reklame Dengan Bapak, Dalam Memenuhi Tugas Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sat Pol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025. pada :

Tanggal : 04 September 2025

Tempat : Ruang Kepala Kantor Sat Pol PP dan Damkar

Demikian disampaikan, mohon petunjuk serta arahan selanjutnya dari Bapak untuk dapat dilaksanakan dan terima kasih.

Siulak, 02 September 2025

Calon Pegawai Negeri Sipil
Sat Pol PP Dan Damkar Kab. Kerinci

PANDER
NIP. 19941220202505 1 001

**CATATAN HASIL KONSULTASI DENGAN PIMPINAN
TERKAIT OPTIMALISASI PROGRAM PENEGAKAN PERDA TENTANG
REKLAME MELALUI PENYULUHAN DIGITAL DAN PENINGKATAN PAJAK
REKLAME UNTUK DAERAH (PRADA) DI KABUPATEN KERINCI**

Hari/Tanggal Kamis, 4 September 2025
Tempat Ruang KASAT POL PP Kabupaten Kerinci

Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan dan memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Persiapkan segala keperluan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan.
2. Laksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku
3. Konsultasi dan jalin kerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.
4. Lakukan konsultasi berkala setiap memulai kegiatan berikutnya.
5. Jalin kerjasama yang baik dengan rekan2 Satpolpp lainnya

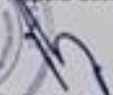
PESERTA



PANDER
Nip.199412202025051001



PIMPINAN
Kepala Satuan


H. NAZIF EDIYANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196708071988031003



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Kantor Bupati Kerinci-Bukit Tengah-Kecamatan Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el: sekda@kerincikab.go.id sekda.kerinci@yahoo.com

PERSETUJUAN

Nomor: 800/ 154 / SAT POL PP DAN DAMKAR/IX/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : H. NAZIF EDIYANTO, SE.MM
Nomor Pegawai / NIP : 19670807 198803 1 003
Pangkat / Jabatan : Pembina Utama Muda IVc / Kepala Sat.Pol .PP dan Damkar
Unit Kerja : Sat.Pol.PP Dan Damkar

Dengan ini menerangkan dan menyetujui kepada :

Nama Lengkap : PANDER
Nomor Pegawai / NIP : 19941220202505 1 001
Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda / II.a / Polisi Pamong Praja Terampil
Unit Kerja : Sat Pol.PP Dan Damkar

Untuk Melaksanakan Kegiatan Konsultasi ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kab. Kerinci. tentang Optimalisasi Program Penegakkan Perda Tentang Reklame Berupa Pendataan Terhadap Penyelenggara Reklame Kabupaten Kerinci dalam Wilayah Kec. Gunung Kerinci, Kec. Siulak dan Kec. Siulak Mukai., Dalam Memenuhi Tugas Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sat Pol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025.

Demikian surat Persetujuani ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Siulak, 04 September 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran Kab.



H. NAZIF EDIYANTO, SE.MM
Pembina Utama Madya IV/c
NIP. 19670807198803 1 003

Lampiran Kegiatan 2

**CATATAN HASIL KONSULTASI DENGAN PIMPINAN
PELAKSANAAN PENDATAAN TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG
BELUM TAAT PAJAK DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH (BPKPD) KABUPATEN KERINCI**

Hari/Tanggal : Senin, 8 September 2025
Tempat : Ruang KASAT POL PP Kabupaten Kerinci

Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan dan memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Persiapkan segala keperluan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan.
2. Laksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
3. Bentuk Tim kecil untuk kegiatan pendataan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kerinci.

PESERTA

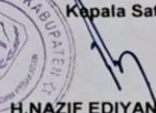


PANDER

Nip.199412202025051001



PIMPINAN
Kepala Satuan


H.NAZIF EDIYANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196708071988031003

FORMULIR PENDATAAN
TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAT PAJAK

No.	Nama Pemilik Reklame	Nama Reklame	Ukuran Reklame	Alamat Reklame	Iklan Yang Terpasang
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

PESERTA

MENTOR

PANDER
Nip.199412202025051001

KUSAINI,S.Sos
Nip.198203102008011002

**FORMULIR PENDATAAN
TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAT PAJAK**

No.	Nama Pemilik Reklame	Nama Reklame	Ukuran Reklame	Alamat Reklame	Iklan Yang Terpasang
1.	Zahwa Laura	Billboard	1,5 x 2 M	Kec.Siulak	Zahwa Laura Digital Printing
2.	Mitra Yuda	Billboard	2 x 3 M	Kec.Siulak	Dodol Kentang Dua Putri 2
3.	Seprial	Billboard	2 x 1,5 M	Kec.Siulak	-
4.	Dafa Saputra	Billboard	2 x 3 M	Kec.Siulak	-
5.	Bayu putra	Billboard	0,50 x 1,5 M	Kec.Siulak Mukai	Rokok L.A Bold / Bayu putra
6.	Weloza	Billboard	2 x 1,5 M	Kec.Siulak Mukai	Villa Weloza
7.	Roni asmara	Billboard	2 x 3 M	Kec.Siulak Mukai	-
8.	Rian rahmat	Billboard	1,5 x 1 M	Kec.Gunung Kerinci	Cat Jotun
9.	Rian rahmat	Neon Box	1,5 x 1 M	Kec.Gunung Kerinci	Cat Dulux
10.	Fariq	Neon Box	0,80 x 1,2 M	Kec.Gunung Kerinci	Fres's Mart

PESERTA



PANDER
Nip.199412202025051001

MENTOR



KUSAINI, S.Sos
Nip.198203102008011002

Lampiran Kegiatan 3

**CATATAN HASIL KONSULTASI DENGAN PIMPINAN
PELAKSANAAN PATROLI KELAPANGAN
TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAT PAJAK**

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Tempat : Ruang KASAT POL PP Kabupaten Kerinci

Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan dan memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Persiapkan segala keperluan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan.
2. Laksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku.
3. Bentuk Tim untuk pelaksanaan patroli kelapangan terhadap penyelenggara reklame yang belum taat pajak
4. Dokumentasikan setiap kegiatan dilapangan saat pelaksanaan Patroli.

PESERTA



PANDER
Nip.199412202025051001



PIMPINAN
Kepala Satuan

H.NAZIF EDIYANTO,SE.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196708071988031003

**DAFTAR NAMA TIM PATROLI KELAPANGAN
TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAT PAJAK**

Hari/Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Tempat : Ruang Trantibum dan Linmas SATPOLPP Kab.Kerinci

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	KUSAINI, S.Sos	198203102008011002	Kasi Trantibum
2.	PANDER	199412202025051001	Polpp Terampil
3.	YUDA ALPI PUTRA	199110042025051001	Polpp Terampil
4.	GIAN RAHMAT SAHASRA	200107192025051002	Polpp Terampil
5.	SKY ALPANI	200310102025051001	Polpp Terampil

PESERTA



PANDER
Nip.199412202025051001



PIMPINAN
Kepala Satuan

H.NAZIF EDIYANTO,SE.,MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196708071988031003

**CATATAN HASIL PATROLI KELAPANGAN
TERHADAP PENYELENGGARA REKLAME YANG BELUM TAAT PAJAK**

Hari/Tanggal : Kamis / Jumat, 18 / 19 September 2025
Tempat : Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak dan
Kecamatan Siulak Mukai

1. Terdapat 2 reklame di Kecamatan Gunung Kerinci yang belum taat pajak.
2. Terdapat 2 reklame di Kecamatan Siulak yang belum taat pajak.
3. Terdapat 1 reklame di Kecamatan Siulak Mukai yang belum taat pajak.

PESERTA



PANDER

Nip.199412202025051001

MENTOR



KUSAINI, S.Sos

Nip.198203102008011002

Lampiran Kegiatan 4

satpolppdamkar... ▾ ● @ + ≡



SatpolPP & Damkar Kab.Kerinci

1
postingan

0
pengikut

57
mengikuti

Praja wibawa

Edit profil

Bagikan profil



**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**Perda No.1 Tahun 2024
Pasal 31
Jenis-jenis Pajak Reklame**

1. Reklame Papan Rillboard /videotron /megatron
2. Reklame Kain
3. Reklame Mekanik /Gitter
4. Reklame Selebaran
5. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame Udara
7. Reklame Apung
8. Reklame Film /Slide dan Peragaan

**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**PAJAK REKLAME ADALAH
PAJAK ATAS
PENYELENGGARA REKLAME**

Perda No.1 Tahun 2024
Tentang
Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**REKLAME ADALAH
BENDA, ALAT ATAU MEDIA
YANG BENTUK DAN CORAK
RAGAMNYA DIRANCANG
UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
MEMPERKENALKAN DAN
MEMPROMOSIKAN ATAU
MENARIK PERHATIAN UMUM
TERHADAP SESUATU**

**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**PERDA NO 1 TAHUN 2024
PASAL 32**

Wajib Pajak Reklame yaitu
orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan reklame

**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**LAMPIRAN II
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RESTRIBUSI DAERAH**

G. RESTRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

**SEWA TANAH PEMDA UNTUK PEMASANGAN
/PEMANCANGAN TIANG PIPA REKLAME**

Jalan Utama	Rp. 300.000	Per M ²	/ Tahun
Jalan Lingkungan	Rp. 120.000	Per M ²	/ Tahun
Jalan Desa	Rp. 70.000	Per M ²	/ Tahun

**# MARI BANGUN KERINCI DENGAN
TAAT MEMBAYAR PAJAK REKLAME**

**# MEWUJUDKAN KERINCI YANG
BERDAYA SAING, MAJU DAN
SEJAHTERA**

**SATPOLPP DAN DAMKAR
KABUPATEN KERINCI**

**Perda Nomor 1 Tahun 2024
Pasal 34**

Tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

- 20% dari nilai sewa reklame
- 25 % khusus untuk reklame yang mempromosikan produk rokok dan minuman beralkohol

satpolppdandamkar... ▾ ● @ + ≡

Ada hal baru?



SatpolPP & Damkar Kab.Kerinci

7
postingan

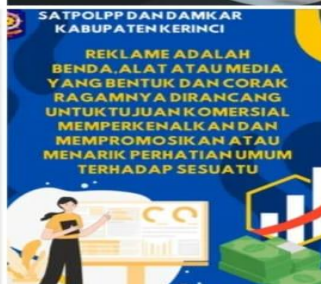
32
pengikut

190
mengikuti

Praja wibawa

Edit profil

Bagikan profil



Lampiran Kegiatan 5

EVALUASI KEGIATAN HASIL PATROLI

Hari/Tanggal :

Tempat :

NO.	KEGIATAN	JENIS REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN
1.				

KESIMPULAN :

REKOMENDASI TINDAK LANJUT :

1.

PESERTA

MENTOR

PANDER
Nip.199412202025051001

KUSAINI, S.Sos
Nip.198203102008011002

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI

Tema Rapat : EVALUASI HASIL PATROLI
 Tempat : Ruang Transtibum SatPuff
 Waktu : 09.00 s.d. Selesai
 Tanggal : Senin, 29-05-2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	KUSAINI, S. Sos.	Kasi TRANSTIBUM	1.
2.	Pander	PolPP Terampil	2.
3.	Gian Rahma, S.	PolPP Terampil	3.
4.	XUDA ALI, RITA	PolPP Terampil	4.
5.	ANTON HENDRA	Staf	5.
6.	Retri Patricia	PolPP Terampil	6.
7.	Yusangreni	Staf	7.
8.	Septa Dinata	Danton	8.

PESERTA

PANDER

Nip.199412202025051001

MENTOR

KUSAINI, S. Sos

Nip.198203102008011002

EVALUASI KEGIATAN HASIL PATROLI

Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2025

Tempat : Ruang Trantibum

NO.	KEGIATAN	JENIS REKLAME	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Hasil Patroli Reklame	1.Billboard	4 unit	Belum taat pembayaran pajak
		2.Neonbox	1 unit	Belum taat pembayaran pajak

KESIMPULAN : Dari hasil patroli yang telah dilakukan terpantau 5 unit reklame yang belum taat dalam pembayaran pajak, dengan rincian 4 unit reklame jenis billboard dan 1 unit reklame jenis neonbox.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT :

1. Koordinasi lintas instansi : meningkatkan kerja sama dengan BPKPD Kabupaten Kerinci untuk menertibkan penyelenggara reklame yang belum taat pajak.

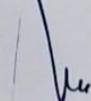
PESERTA



PANDER

Nip.199412202025051001

MENTOR



KUSAINI, S.Sos

Nip.198203102008011002

Laporan Kegiatan 6



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**
Komplek Kantor Bupati Kerinci-Bukit Tengah-Kecamatan Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el: sekda@kerincikab.go.id sekda.kerinci@yahoo.com

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMALISASI PROGRAM PENEGAKAN PERDA TENTANG REKLAME MELALUI PENYULUHAN DIGITAL DAN PENINGKATAN PAJAK REKLAME UNTUK DAERAH (PRADA) DI KABUPATEN KERINCI

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sektor pajak reklame memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan yang potensial. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan penyelenggara reklame terhadap ketentuan pajak daerah, lemahnya penegakan peraturan, serta keterbatasan media penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kondisi ini mendorong perlunya inovasi dalam pelaksanaan program penegakan perda reklame, salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Penyuluhan berbasis digital memungkinkan pesan dan informasi terkait peraturan daerah disampaikan dengan lebih cepat, luas, dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan judul "Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan Digital dan Peningkatan Pajak Reklame untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci", yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aspek edukasi, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak reklame.

B. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang penyelenggaraan reklame melalui pendekatan penyuluhan digital.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak daerah.
3. Memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya antara Satpol PP dan BPKPD, dalam pelaksanaan patroli, pendataan, serta evaluasi reklame.

4. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, agar terwujud pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal/Bulan/Tahun	: 1 September s/d 4 Oktober 2025
Tempat	: Instansi Satpol PP dan Damkar Kab. Kerinci
Peserta	: Kasat, Kasi Trantibum, staf ASN Lainnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi diawali dengan konsultasi bersama pimpinan untuk memperoleh arahan dan memastikan kesesuaian dengan program kerja instansi. Kegiatan dilanjutkan dengan pendataan penyelenggara reklame melalui koordinasi dengan BPKPD guna memastikan data yang akurat dan valid. Selanjutnya dibentuk tim pelaksana patroli reklame yang bekerja secara kolaboratif dan akuntabel.

Sebagai bentuk inovasi, dibuat akun media sosial Instagram dan poster digital sebagai sarana penyuluhan mengenai pentingnya pajak reklame. Kegiatan diakhiri dengan rapat evaluasi bersama tim serta penyusunan laporan hasil patroli yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

E. Hasil Kegiatan

Kegiatan aktualisasi ini menghasilkan beberapa capaian penting, baik secara kualitatif maupun kuantitatif:

a. Kualitatif:

- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan BPKPD dalam penegakan perda reklame.
- Meningkatnya kesadaran penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak daerah melalui penyuluhan digital.
- Terbentuknya budaya kerja yang lebih akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan di lingkungan kerja.

b. Kuantitatif:

- Tersusunnya 1 akun media sosial aktif (Instagram) sebagai media penyuluhan digital.

- Dihasilkannya 5 desain poster digital tentang pajak dan peraturan reklame yang disebarluaskan secara daring.
- Terlaksananya 3 kali patroli lapangan dengan hasil identifikasi reklame yang belum taat pajak untuk ditindaklanjuti.
- Meningkatnya pemahaman wajib pajak reklame terhadap peraturan daerah tentang reklame berdasarkan hasil evaluasi lapangan sebesar 20% dibandingkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

F. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan aktualisasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat serta koordinasi antarinstansi. Namun demikian, beberapa hal perlu diperhatikan untuk pelaksanaan selanjutnya, antara lain:

- Perlunya peningkatan frekuensi dan jangkauan penyuluhan digital agar informasi dapat diterima oleh lebih banyak masyarakat.
- Diperlukan pembaruan data reklame secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penegakan perda.
- Perlu adanya penguatan dukungan dari pimpinan terkait anggaran dan sarana digital agar program penyuluhan lebih optimal.

G. Rekomendasi

Memperkuat sistem pendampingan dan mentoring agar nilai-nilai BerAKHLAK dapat diterapkan secara berkelanjutan di tempat kerja, serta menambah materi pelatihan berbasis literasi digital. Dan diharapkan dapat menindaklanjuti hasil aktualisasi dengan menjadikannya sebagai model praktik baik dalam peningkatan kepatuhan pajak reklame, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung inovasi digital dalam pelayanan publik.

H. Penutup

Melalui kegiatan aktualisasi ini, peserta telah berupaya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan output berupa media penyuluhan digital dan data reklame yang lebih akurat, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan instansi.

Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penguatan sistem penegakan Perda reklame yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan demi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci.

PESERTA,

MENTOR,

(PANDER)

NIP. 199412202025051001

(KUSAINI,S.Sos)

NIP. 198203102008011002

**CATATAN HASIL KONSULTASI DENGAN PIMPINAN
TERKAIT PEMBUATAN LAPORAN**

Hari/Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Tempat : Ruang KASAT POL PP Kabupaten Kerinci

Pimpinan memberikan dukungan penuh terhadap program yang akan dijalankan dan memberikan beberapa masukan sebagai berikut :

1. Persiapkan segala keperluan dengan baik untuk melaksanakan kegiatan Pembuatan laporan.
2. Laksanakan kegiatan pembuatan laporan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pelajari cara pembuatan laporan dengan baik.

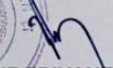
PESERTA



PANDER
Nip.199412202025051001



**PIMPINAN
Kepala Satuan**


H. NAZIF EDIYANTO, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.196708071988031003



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Komplek Kantor Bupati Kerinci-Bukit Tengah-Kecamatan Siulak, Kode Pos 37162
Pos-el sekda@kerincikab.go.id sekda_kerinci@yahoo.com

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN OPTIMALISASI PROGRAM PENEGAKAN PERDA TENTANG REKLAME
MELALUI PENYULUHAN DIGITAL DAN PENINGKATAN PAJAK REKLAME UNTUK
DAERAH (PRADA) DI KABUPATEN KERINCI**

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), sektor pajak reklame memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber pendapatan yang potensial. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan di lapangan, seperti rendahnya kepatuhan penyelenggara reklame terhadap ketentuan pajak daerah, lemahnya penegakan peraturan, serta keterbatasan media penyuluhan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kondisi ini mendorong perlunya inovasi dalam pelaksanaan program penegakan perda reklame, salah satunya melalui pemanfaatan media digital. Penyuluhan berbasis digital memungkinkan pesan dan informasi terkait peraturan daerah disampaikan dengan lebih cepat, luas, dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan dengan judul "Optimalisasi Program Penegakan Perda tentang Reklame melalui Penyuluhan Digital dan Peningkatan Pajak Reklame untuk Daerah (PRADA) di Kabupaten Kerinci", yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aspek edukasi, pengawasan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak reklame.

B. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan efektivitas penegakan Perda tentang penyelenggaraan reklame melalui pendekatan penyuluhan digital.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak daerah.
3. Memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya antara Satpol PP dan BPKPD, dalam pelaksanaan patroli, pendataan, serta evaluasi reklame.

4. Menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, agar terwujud pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Tanggal/Bulan/Tahun	: 1 September s/d 4 Oktober 2025
Tempat	: Instansi Satpol PP dan Damkar Kab.Kerinci
Peserta	: Kasat, Kasi Trantibum, staf ASN Lainnya.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi diawali dengan konsultasi bersama pimpinan untuk memperoleh arahan dan memastikan kesesuaian dengan program kerja instansi. Kegiatan dilanjutkan dengan pendataan penyelenggara reklame melalui koordinasi dengan BPKPD guna memastikan data yang akurat dan valid. Selanjutnya dibentuk tim pelaksana patroli reklame yang bekerja secara kolaboratif dan akuntabel.

Sebagai bentuk inovasi, dibuat akun media sosial Instagram dan poster digital sebagai sarana penyuluhan mengenai pentingnya pajak reklame. Kegiatan diakhiri dengan rapat evaluasi bersama tim serta penyusunan laporan hasil patroli yang disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan tindak lanjut.

E. Hasil Kegiatan

Kegiatan aktualisasi ini menghasilkan beberapa capaian penting, baik secara kualitatif maupun kuantitatif:

a. Kualitatif:

- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan BPKPD dalam penegakan perda reklame.
- Meningkatnya kesadaran penyelenggara reklame terhadap kewajiban pajak daerah melalui penyuluhan digital.
- Terbentuknya budaya kerja yang lebih akuntabel, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan di lingkungan kerja.

b. Kuantitatif:

- Tersusunnya 1 akun media sosial aktif (Instagram) sebagai media penyuluhan digital.

- Dihasilkannya 5 desain poster digital tentang pajak dan peraturan reklame yang disebarluaskan secara daring.
- Terlaksananya 3 kali patroli lapangan dengan hasil identifikasi reklame yang belum taat pajak untuk ditindaklanjuti.
- Meningkatnya pemahaman wajib pajak reklame terhadap peraturan daerah tentang reklame berdasarkan hasil evaluasi lapangan sebesar 20% dibandingkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

F. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan aktualisasi berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat serta koordinasi antarinstansi. Namun demikian, beberapa hal perlu diperhatikan untuk pelaksanaan selanjutnya, antara lain:

- Perlunya peningkatan frekuensi dan jangkauan penyuluhan digital agar informasi dapat diterima oleh lebih banyak masyarakat.
- Diperlukan pembaruan data reklame secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian dalam penegakan perda.
- Perlu adanya penguatan dukungan dari pimpinan terkait anggaran dan sarana digital agar program penyuluhan lebih optimal.

G. Rekomendasi

Memperkuat sistem pendampingan dan mentoring agar nilai-nilai BerAKHLAK dapat diterapkan secara berkelanjutan di tempat kerja, serta menambah materi pelatihan berbasis literasi digital. Dan diharapkan dapat menindaklanjuti hasil aktualisasi dengan menjadikannya sebagai model praktik baik dalam peningkatan kepatuhan pajak reklame, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mendukung inovasi digital dalam pelayanan publik.

H. Penutup

Melalui kegiatan aktualisasi ini, peserta telah berupaya mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan output berupa media penyuluhan digital dan data reklame yang lebih akurat, tetapi juga memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas di lingkungan instansi.

Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal dalam penguatan sistem penegakan Perda reklame yang lebih transparan, partisipatif, dan berkelanjutan demi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kerinci.

PESERTA,



(PANDER)

NIP. 199412202025051001

MENTOR,



(KUSAINI, S.Sos)

NIP. 198203102008011002